

EDISI 46 / 2018

EDUKASI

K E U A N G A N

PELATIHAN DANA DESA

Membagi ilmu ke penjuru negeri



Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI
Sugeng Satoto

SEKRETARIAT
Abdul Aziz Maghfur
Dodi Septariza
Naseh Iskandar
Eko Supriyono
Fitria Sri Wulandari

REDAKTUR
Khalimi
Andi Manaek
Soderi
Eko Prasetyo
Tri Wibowo
Muhammad Irfan
Rio Suareski
Agus Hekso Pramudijono
Hartono
Agung Darono
Sintawati
Kurniawan
Inwan Hadiansyah
Agus Sunarya
R. Adhi Sutanto
Eduard Tambunan
Pilar Wirotama

EDITOR
Sudrajat
Ari Sandi Robert
Retyan Laksita Mutiary
Ardes Martua Sitanggang
Yohana Tolla
Imam Asma Nur Alam Marbun
Ridwan Sidik Kurniawan
Bima Lingga Sakti

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER
Muhammad Fath Kathin
Victorianus M. I. Bimo Adi
Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI
Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	16
PROFIL	22
SERAMBI ILMU	29
TAHUKAH KAMU	43
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	47
CERITA ALUMNI	49
TIPS & TRIK	52
MATA AIR	54
KESEHATAN	56
<i>POINT OF INTEREST</i>	58
RESENSI	61
GALERI	62
KANG EDU	64

Program Pelatihan 2018

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKN STAN



Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKN STAN menyediakan pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah bagi para aparatur pemerintah daerah.

Jenis pelatihan:

- PBB P2
- Perpajakan Daerah
- Akuntansi Keuangan Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah
- Manajemen Aset Daerah
- Badan Layanan Umum Daerah
- Audit Keuangan Daerah
- Komputer/Sistem Informasi

Informasi pendaftaran dapat menghubungi:
021-7361654-56 ext 112
Annisa Pramujati (08161806677)
Apriansyah Ridwan (085692680160)

Sekretariat: Gedung M Lantai I, Kampus PKN STAN
Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, Banten 15222
Telepon (021) 7361654-56, Faksimili (021) 7361653
Situs: www.pknstan.ac.id



SALAM REDAKSI

Besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah untuk desa perlu diimbangi dengan kualitas pengelolaannya. Jika tidak, berapapun besaran dana desa tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sesuai yang direncanakan. Lebih buruk, para Kepala desa dan aparatur desa bisa terjerat pidana akibat kesalahan dan ketidakmampuan mereka dalam mengelola dana desa sesuai dengan undang-undang.

Itulah mengapa penyaluran dana desa juga harus diikuti dengan program peningkatan kompetensi para pengelola keuangan desa dengan ragam latar pendidikan dan pengalaman. Disinilah BPPK melalui Pusdiklat KNPK mengambil peran. Pusdiklat KNPK memboyong 4 Pelatihan Dana Desa yang ditujukan khusus bagi para aparat di daerah. Simak cerita tim kami yang langsung terbang ke Sumba untuk meliput pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini.

Selain itu, di rubrik Liputan Khusus, teman kami di Pusdiklat Pajak membagi ceritanya tentang melatih petugas pajak daerah agar mereka bisa meningkatkan penerimaan daerah.

Mulai edisi ini, kami mencoba pendekatan yang sedikit berbeda di rubrik Profil. Jika biasanya kami mengangkat profil pejabat, kali ini kami mencoba mengangkat profil pelaksana di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, yaitu Fitri Mayang Sari. Meskipun berstatus pelaksana, seabrek kegiatan kantor maupun di luar kantor ia ikuti. Simak kisahnya di rubrik profil kali ini.

Dan tentunya rubrik khas Edukasi Keuangan lainnya juga masih bisa anda nikmati di edisi ini, seperti misalnya Serambi Ilmu, Cerita Alumni oleh Erwin Djuadja serta oleh-oleh cerita dan galeri dari BDK Magelang dan BDK Yogyakarta.

Selamat membaca!

STUDI BANDING LATSAR

Sebanyak 25 peserta Pelatihan Dasar (latsar) Kementerian Perindustrian melakukan studi lapangan ke Sekretariat BPPK. Mereka berkunjung untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan di BPPK, khususnya studi banding latsar yang dinaungi Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), serta *Corporate University* Kementerian Keuangan

**BINCANG RAMADHAN**

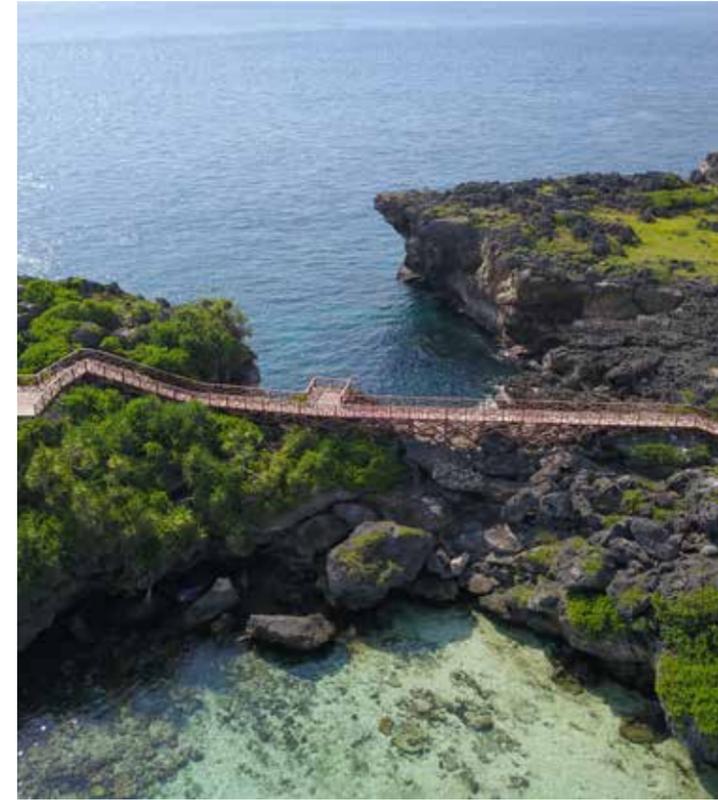
BPPK menyelenggarakan Bincang Ramadhan bersama Kepala Badan, acara yang mengundang seluruh pegawai hingga pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat BPPK ini, tetap berjalan khidmat. Acara ini juga menjadi ajang untuk bermaaf-maafan sebelum lebaran sekaligus sebagai kesempatan untuk memberikan santunan dan paket lebaran secara simbolis kepada para pegawai honorer di lingkungan BPPK.

PELANTIKAN DOSEN

Sebanyak sepuluh pegawai BPPK resmi dilantik sebagai Dosen Lektor Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Kesepuluh dosen baru tersebut kini resmi mengemban tugas, kewajiban, serta hak sebagai dosen yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi. Upacara pelantikan yang diselenggarakan pada hari Jumat, 22 Juni 2018, dipimpin oleh Kepala BPPK.

**UPACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BPPK DAN DJPK**

Berlangsung di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti dilantik menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggantikan Boediarso Teguh Widodo. Jabatan Kepala BPPK diserahkan kepada Rionald Silaban yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. Upacara ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri pula oleh Wakil Menteri Keuangan, pejabat Eselon I dan II Kemenkeu, serta Ketua Badan Anggaran DPR RI.



IMAM ASMA NUR ALAM MARBUN

MENGUNGKIT KOMPETENSI SDM APARAT PENGELOLA DANA DESA

Menuju Tahun 2019 Tanpa Desa Tertinggal

Keseriusan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai dengan bunyi Nawa Cita ketiga diwujudkan dengan didistribusikannya Dana Desa yang menjadi komponen baru dana transfer ke desa selain Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta bentuk bantuan keuangan lain yang sebelumnya telah ada. Total dana desa yang telah dikucurkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 mencapai Rp 187,74 triliun. Sampai tahun 2017, dana tersebut telah membiayai dibangunnya lebih dari 121.000 kilometer jalan desa, 1.960 kilometer jembatan, dan puluhan ribu unit tambatan perahu, embung, sarana olahraga, irigasi, MCK, PAUD, Posyandu, serta berbagai bentuk infrastruktur desa lainnya.

Semakin besarnya kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengelola dana desa, menyisakan pekerjaan rumah yang salah satunya disebabkan oleh belum siapnya perangkat desa untuk mengelola dana tersebut. Ketidaksiapan tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya penggunaan dana desa yang belum selaras dengan program pembangunan kawasan perdesaan. Desa juga belum mampu melakukan pencatatan dan inventarisasi atas aset desa yang diperoleh dari APBN/APBD. Padahal, pengelolaan dan pelaporan dana desa yang tidak paripurna dapat menyebabkan terhambatnya kucuran dana selanjutnya ke desa bersangkutan.

Tingkat pendidikan aparat desa yang relatif rendah dan tidak merata adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Sementara itu, besarnya dana dan aset yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Dari banyaknya laporan aduan penyelewengan yang disampaikan kepada Satgas Desa, sebagian di antaranya

justru bukan murni penyelewengan, tetapi lebih karena ketidakpahaman atas pengelolaan dana tersebut.

Fenomena tersebut ditanggapi secara serius oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan c.q. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) yang sejak tahun 2015 telah melakukan pendalaman dan sinergi yang intensif dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Pemerintah Daerah untuk merumuskan formula yang diperlukan dalam rangka penguatan aparat desa terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui program pelatihan.

Hingga Mei tahun 2018, sebanyak 2.047 orang peserta yang berasal dari 671 desa di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK. Pelatihan yang diselenggarakan dikelompokkan menjadi



empat kategori pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola keuangan dan aset desa. Keempat kompetensi ini diantaranya adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran desa;
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban aset desa;
4. Pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes.

Keterbatasan dana dan waktu yang dihadapi pada jumlah desa di Indonesia yang mencapai lebih dari 74.000 desa, membuat penyelenggara diklat harus menentukan wilayah mana saja yang mesti diprioritaskan sebagai resipien pelatihan. Dengan berbagai pertimbangan, terutama terkait level ketertinggalan dan kesiapan sarana prasarana, tiga provinsi tadi dipilih berdasarkan hasil mufakat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Di level lokal, BPPK juga bekerja sama dengan Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD/DPMD) Provinsi. BPMD/DPMD tiap-tiap provinsi bertindak sebagai penghubung antara penyelenggara diklat dengan pemerintah desa. Merekalah yang memberikan rekomendasi lokasi penyelenggaraan dan nama-nama desa calon peserta pelatihan dengan mempertimbangkan keterjangkauan

dan kesiapan sarana prasarana di lokasi pelatihan. BPMD/DPMD juga yang memberikan rekomendasi pengajar lokal yang turut mengisi materi di dalam pelatihan.

Meski telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di desa hingga 10 juta jiwa, Menteri Desa PDTT dan Menteri Keuangan sepakat bahwa angka ini masih belum cukup signifikan. Menyikapi hal tersebut, sejak akhir tahun 2017 lalu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah perubahan terhadap sistem penghitungan dan penyaluran dana desa. Pemerintah juga mulai mengimbau desa untuk menerapkan skema padat karya tunai dalam pengelolaan dananya. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, penciptaan upah dan perluasan akses serta mutu pelayanan.

Dari sisi pengembangan SDM, pelatihan dana desa yang terus akan digalakkan di tahun-tahun mendatang, diharapkan akan menyasar lebih banyak desa di lebih banyak daerah. Program ini juga diharapkan dapat mendukung target proyeksi Kemendes PDTT terkait kebijakan dana desa untuk meningkatkan status desa-desa, dari yang tertinggal menjadi berkembang, dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Sehingga, sesuai proyeksi Kemendes PDTT, pada tahun 2019 mendatang, tidak akan dijumpai lagi desa tertinggal di Indonesia.



4 PELATIHAN DANA DESA

YOHANA TOLLA

Memperkuat Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Desa

Keberpihakan terhadap kepentingan daerah terluar, tertinggal, dan terdepan merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang saat ini tengah diusung pemerintah. Strategi tersebut diwujudkan dengan adanya reorientasi alokasi dan distribusi sumber daya antar daerah dari berbagai sumber kepada daerah tertinggal, perbatasan, terluar, dan rawan bencana. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan program Dana Desa, dimana melalui program ini, desa diberi kesempatan untuk melaksanakan kewenangannya dalam mengurus dan mengelola tata pemerintahannya sendiri. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan akuntabel, maka BPPK melalui Pusdiklat KNPK menginisiasi Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Layaknya penyusunan program pelatihan di BPPK, program ini juga diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan diklat yang dimulai dengan survei awal guna menggali informasi terkait kompetensi apa saja yang diperlukan bagi perangkat desa untuk menata laksana dana desa. Hasil survei tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam desain pembelajaran. Ada empat kompetensi yang dibutuhkan, yaitu mampu menatalaksanakan perencanaan dan penganggaran desa dengan baik, mampu melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan baik, mampu melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban aset desa dengan baik, serta mampu melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUM Desa dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Keempat kompetensi tadi diwujudkan dalam empat program diklat, yaitu Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa, Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Desa, dan yang

terakhir adalah Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa. Masing-masing program pelatihan ini menasar pada peserta yang berbeda, dimana masing-masing desa diharapkan dapat mengikuti keempat program tersebut sehingga perangkat desa dapat memahami secara menyeluruh. Pada akhirnya, seluruh perangkat desa diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan dana desa.

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bertujuan untuk membekali peserta dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran desa dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan, yang meliputi penyusunan Rencana Jangka Panjang Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan Peraturan Desa tentang Perencanaan dan Penganggaran Desa. Sasaran dari program diklat ini adalah para Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa dan/atau aparatur desa yang membidangi



perencanaan dan penganggaran desa. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari kerja.

Sedangkan Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa bertujuan untuk membekali peserta agar mampu melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang meliputi kemampuan melakukan penatausahaan pendapatan desa, melakukan penatausahaan belanja desa, melakukan penatausahaan pembiayaan desa, serta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban APBDesa dengan mengoperasikan Aplikasi Siskeudes. Pelatihan ini berlangsung selama empat hari dengan sasaran peserta adalah Kepala Seksi dan/atau Bendahara Desa dan/atau aparatur desa yang membidangi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Untuk membekali peserta dalam hal aset, maka disusunlah program Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Desa. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta agar mampu untuk melaksanakan pengelolaan

dan pertanggungjawaban aset desa dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang meliputi kemampuan inventarisasi aset desa, pencatatan/ pembukuan aset desa, dan penyusunan *database* dan laporan pertanggungjawaban aset desa. Pelatihan ini berlangsung selama empat hari, dengan menasar kepala seksi dan/atau kepala urusan dan/atau aparatur desa yang membidangi pengelolaan dan pertanggungjawaban aset desa.

Program pelatihan yang terakhir adalah Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi BUMDesa dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDesa, yang meliputi pemahaman tentang proses pendirian BUMDesa, pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan BUMDesa, serta penggunaan *Ms. Excel* sebagai alat bantu dalam menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan BUMDesa. Pelatihan ini dilaksanakan selama empat hari.

Ajak Pemerintah Daerah Demi Hasil Terbaik

Sebelum program ini dilaksanakan, tim dari Pusdiklat KNPk, yang terdiri dari pejabat, widyaiswara, dan pelaksana, mengadakan survei sebanyak dua kali. Ada tiga provinsi yang menjadi sasaran, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan ketiga provinsi ini bukan tanpa alasan.

“Pada saat Musrenbang dimana Bappenas memfasilitasi pertemuan antara kementerian pusat dan perwakilan daerah, kementerian yang istilahnya mengintervensi daerah dengan rencana program mereka kemudian disandingkan dengan daerah mana saja yang siap untuk melaksanakannya,” ungkap Gunawan Sugeng Hariadi, Kepala Subbidang Program Pusdiklat KNPk.

Survei pertama dilakukan pada bulan November 2017, sedangkan survei kedua dilakukan pada bulan Januari 2018. Pada survei yang pertama, Tim Pusdiklat KNPk berkonsultasi dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Provinsi setempat. Selain itu, mengingat wilayah yang cukup luas, maka penting juga untuk menentukan lokasi penyelenggaraan. Bersama-sama dengan DPMD/ BPMD Provinsi setempat, tim survei menentukan lokasi penyelenggaraan diklat yang didasarkan kepada kemudahan akses transportasi dan tempat pelaksanaan dengan fasilitas yang memadai. Setiap provinsi biasanya dibagi berdasarkan tiga *cluster* berdasarkan kedekatan lokasi. Survei yang kedua lebih kepada pematangan persiapan, seperti kesiapan lokasi, fasilitas, kesiapan peserta, dan sebagainya. “Kita *sih* maunya (desa) yang paling tertinggal ya, tapi kalau tidak efisien untuk menjangkaunya ya susah juga,” ujar Gunawan lagi.

Terkait peserta program pelatihan, Pusdiklat KNPK berkoordinasi dengan BPMD/DPMD masing-masing provinsi untuk mendapatkan rekomendasi desa yang akan diikutsertakan dalam program pelatihan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, setiap desa yang dipilih oleh BPMD/DPMD akan mengirimkan empat aparatnya sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing program.

Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ini diperkuat oleh jajaran pengajar yang mumpuni. Para pengajar, yang merupakan widyaiswara dan dosen di lingkungan BPPK dibekali dengan *Training of Trainers* (TOT). TOT ini bersifat penyegaran untuk persiapan mengajar dengan menghadirkan pengajar dari Kemendagri, Kemendes, dan BPKP. Widyaiswara dan dosen peserta TOT ini dipilih berdasarkan keahliannya, yaitu dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Selama kegiatan TOT, para pengajar diminta untuk mengisi formulir prioritas pilihan kompetensi yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk penugasan. Selain dari internal BPPK, program pelatihan ini juga melibatkan pengajar dari pejabat pemerintah daerah setempat. Para pejabat

tersebut merupakan hasil rekomendasi dari BPMD/DPMD provinsi masing-masing lokasi penyelenggaraan pelatihan. Selain karena adanya kedekatan kultural, pemilihan pengajar lokal yang merupakan pejabat setempat dinilai sangat membantu, karena merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Agar pengajar dari Pemda memiliki kesamaan persepsi dengan pengajar dari BPPK, maka Pusdiklat KNPK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* sebelum dilaksanakannya pelatihan sehingga semua pengajar memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman terkait desain pembelajaran yang telah disusun.

Agar program pelatihan ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan dan koordinasi dengan banyak pihak, baik dari internal maupun eksternal Kemenkeu. Koordinasi dilakukan dalam banyak hal, mulai dari penyusunan desain pembelajaran, penyusunan modul pelatihan, keterlibatan dalam kegiatan mengajar, penentuan lokus kegiatan, pemilihan desa untuk dijadikan peserta pelatihan, dan koordinasi menyangkut dengan hal lain yang sifatnya pendukung. Koordinasi di lingkungan internal Kemenkeu melibatkan BPPK, DJPK, Setjen, Itjen, serta instansi vertikal Kemenkeu di provinsi tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan. Masing-masing instansi memiliki perannya masing-masing, seperti BPPK berperan sebagai penyelenggara pelatihan, mulai dari penyusunan desain pembelajaran sampai pada kegiatan evaluasi. DJPK berperan dalam penyusunan desain pembelajaran program pelatihan bersama-sama dengan BPPK, Kemendagri, dan Kemendes. Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal berperan dalam hal penganggaran dan kinerja. Itjen berperan dalam hal pengawasan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di lokasi penyelenggaraan pelatihan, berperan dalam koordinasi terkait sarana dan prasarana.

“Kalau dari kita *sih* targetnya hanya akuntabilitas, fokus di situ, *nggak* lagi *ngatur* dananya untuk apa, itu kewenangan kementerian lain,” ujar Trisni Syamsu Indyaputri, Kepala Subbidang Kurikulum Pusdiklat KNPK.

Koordinasi dengan instansi di luar Kementerian Keuangan juga dilakukan, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Koordinasi dilakukan dalam rangka penyusunan desain pembelajaran, penyusunan modul, juga keterlibatan dalam kegiatan mengajar. Penyusunan desain pembelajaran dan modul dilakukan bersama-sama antara BPPK, DJPK, Kemendagri dan Kemendes mengingat kompetensi yang diperlukan cukup luas dan tidak hanya kompetensi yang ada di Kementerian Keuangan. Sedangkan dalam kegiatan mengajar, BPPK, Kemendagri dan Kemendes dilibatkan dalam program TOT sebagai tenaga pengajar.

RIDWAN SIDIK KURNIAWAN

Dari Pelatihan, Asistensi, Hingga Evaluasi:



KOMITMEN BPPK MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

Menyelenggarakan pelatihan dengan terjun langsung ke desa tentunya memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan menyelenggarakan pelatihan di Pusdiklat atau Balai Diklat. Banyak kendala yang berpotensi muncul baik dari sarana dan prasarana, koordinasi, dan faktor teknis maupun nonteknis lainnya. Tantangan ini rupanya dapat dijawab dengan baik oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) dengan menggelar Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa untuk provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah pada bulan Februari sampai dengan Mei lalu.

Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang diperuntukkan untuk ketiga provinsi tersebut terbagi menjadi tiga angkatan. Setiap angkatan terdiri dari empat kategori pelatihan, dimana setiap kategori pelatihan memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda. Dalam satu angkatan, setiap kategori pelatihan memiliki jadwal pelatihan yang berbeda dengan kategori lainnya, sedangkan untuk setiap kategori pelatihan yang sama bisa diselenggarakan serentak di masing-masing lokasi pada tiga provinsi yang berbeda. Dengan banyaknya daerah yang menjadi lokasi pelatihan ini diharapkan dapat menjangkau desa-desa yang tersebar di berbagai daerah serta memudahkan para peserta untuk mendatangi lokasi pelatihan.

Setiap peserta pelatihan yang merupakan perwakilan dari desa diharapkan untuk tidak mengikuti lebih dari satu kategori pelatihan, sehingga diharapkan kompetensi yang diharapkan tercapai dari pelatihan ini tidak hanya dikuasai oleh satu orang perwakilan desa saja. Dengan demikian, setiap desa yang ingin mendapatkan semua kompetensi dari pelatihan ini harus mengirimkan 4 orang peserta. Tidak kurang dari 2.047 peserta

yang berasal dari 671 desa, dengan rincian 202 desa di provinsi Sulawesi Tenggara, 273 desa di Nusa Tenggara Timur, dan 196 desa di Sulawesi Tengah tercatat mengikuti pelatihan ini. Jumlah tersebut bukanlah jumlah total keseluruhan desa yang berada di wilayah ketiga provinsi tersebut. Tidak semua desa dapat mengikuti pelatihan ini, melainkan hanya desa-desa tertentu yang diprioritaskan oleh masing-masing daerah. Adapun tahapan seleksi untuk menentukan desa mana saja yang diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing daerah.

Setiap peserta yang mengikuti pelatihan wajib mengikuti *pretest* yang dilaksanakan sebelum materi pelatihan diberikan dan *posttest* pada akhir pelatihan. Berkaca dari hasil tes yang telah dilaksanakan tersebut, terlihat bahwa pelatihan ini membuahkan hasil yang cukup positif. Sebanyak 69,74% peserta mendapatkan nilai *posttest* yang lebih tinggi, yang artinya sebagian besar peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik setelah diberikan pelatihan. Tolok ukur keberhasilan dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK ini juga bisa dilihat dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para peserta dimana mayoritas peserta pelatihan menyatakan sangat puas terhadap para pengajar yang memberikan materi dan penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan.

“Berbagai kesulitan yang kami temui di desa lewat forum ini, lewat pelatihan ini, kami bisa menyampaikan segala sesuatu. Dan syukur *alhamdulillah* lewat pemateri-pemateri pendamping dan juga penyelenggara, kami dapat solusi-solusi yang dapat kami laksanakan setelah kami pulang di daerah masing-masing,” ujar Muhammad Aidin Salam, Kepala Desa Labotan, Kabupaten Banggai.

Ungkapan terima kasih peserta juga disampaikan oleh Musliyadi, peserta dari Desa Patowunua, Kolaka Utara, “Selama ini kami merasa bahwa kami ini sudah pintar, sudah memiliki ilmu lebih, ternyata menghadapi materi ini kami tidak ada apa-apanya. Jadi kami

termotivasi bagaimana ingin mempelajari lebih jauh lagi, itu pengalaman yang sangat mendalam.”

Besarnya dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat saat ini belum diimbangi oleh sumber daya manusia yang memadai. Padahal pengelolaan atas dana desa tersebut menimbulkan risiko yang cukup tinggi. Dalam banyak kasus, penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa bukan murni sebuah penyelewengan. Seringkali didapati kasus penyalahgunaan dana desa terjadi hanya karena aparat desa kurang paham terhadap aturan dalam pengelolaan dana desa yang berlaku. Fakta ini membuat program Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ini disambut dengan baik oleh para peserta pelatihan dan pemerintah setempat.

Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan Tim Edukasi Keuangan kepada beberapa perangkat desa dan pemerintah setempat, mereka sangat mengapresiasi pelatihan yang telah diadakan oleh Pusdiklat KNPK. Saat ini mereka masih sangat membutuhkan pelatihan seperti ini agar dapat lebih memahami pengelolaan dana desa dengan lebih baik. Marthen R. Bira, Kepala Desa Tebawa yang juga mengirimkan perwakilannya dalam pelatihan ini menyatakan bahwa desanya mendapat manfaat langsung dari pelatihan tersebut. “Kebetulan kami saat ini sedang menyusun APBDDes kami, jadi *pas* sekali. Kami mendapatkan gambaran yang bagus (dalam pengelolaan dana desa) sehingga banyak hal yang selama ini masih kami pertanyakan, kami dapatkan jawabannya kemarin,” terangnya.

Sementara itu dalam kesempatan lainnya, Plt. Bupati Sumba Barat Daya, Ndara Tanggu Kaha, mengutarakan harapannya terhadap kelanjutan dari pelatihan ini. “Tolong kami dibantu lagi dengan pelatihan karena kami sangat butuh pelatihan untuk seluruh Kepala Desa dan aparat. Sekarang sudah dilaksanakan pelatihannya, kami mohon tahun depan dilanjutkan lagi dengan pelatihan (yang lain),” ungkapnya.



MARTHEN R. BIRA
Kepala Desa Tebawa



MUHAMMAD AIDIN SALAM
Kepala Desa Labotan



MUSLIYADI
Peserta dari Desa Patowunua



NDARA TANGGU KAHA
Plt. Bupati Sumba Barat Daya

“Selama ini kami merasa bahwa kami ini sudah pintar, sudah memiliki ilmu lebih, ternyata menghadapi materi ini kami tidak ada apa-apanya. Jadi kami termotivasi bagaimana ingin mempelajari lebih jauh lagi, itu pengalaman yang sangat mendalam.”

Sebagai kelanjutan dari pelatihan yang telah diselenggarakan, Pusdiklat KNPK akan melaksanakan kegiatan asistensi untuk membantu daerah dalam menerapkan pengelolaan dana desa lebih baik. Asistensi tersebut terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi ini telah dimulai sejak bulan Mei lalu. Selain kegiatan asistensi tersebut, Pusdiklat KNPK juga berencana untuk mengadakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan yang direncanakan akan dimulai pada bulan Agustus 2018. Evaluasi ini selain untuk mengetahui *outcome* dari pelatihan terhadap desa-desa yang mengikuti pelatihan, juga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan untuk pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Keberhasilan Pusdiklat KNPK dalam menyelenggarakan pelatihan Program

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa tidak akan berhenti hanya pada tiga provinsi ini saja. Tahun depan, Pusdiklat KNPK kembali berencana untuk menggelar pelatihan yang serupa. Bahkan, Pusdiklat KNPK juga berencana menambah jumlah provinsi yang menjadi lokasi pelatihan dari semula berjumlah tiga provinsi tahun ini, menjadi empat provinsi untuk tahun depan. Rangkaian kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat KNPK, baik dari kegiatan pelatihannya itu sendiri maupun kegiatan-kegiatan pasca pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti kepada desa-desa yang terkait. Melalui kegiatan ini, diharapkan ke depannya dapat tercipta pengelolaan dana desa yang lebih baik sehingga dapat membantu mewujudkan amanah Nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

TRIO HANDOKO

Latih Petugas Pajak Daerah Guna Tingkatkan Penerimaan Daerah



Kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan dana transfer daerah sebesar Rp18,3 triliun pada tahun 2017 sempat membuat Pemerintah Daerah meradang. Alokasi dana transfer daerah di APBN 2016 sebesar Rp723,2 triliun menjadi Rp704,9 triliun di tahun 2017. Walaupun pada akhirnya di tahun 2018, dana transfer daerah kembali mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, yakni sebesar Rp706,2 triliun (Sumber: kemenkeu.go.id), kebijakan tersebut tentu saja membuat para pejabat daerah memutar otak dalam-dalam untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pajak daerah tentu saja menjadi andalan untuk menutupi lubang pengeluaran dalam APBD, sehingga penggalan potensi pajak daerah dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada giat dilakukan.

Giatnya penggalan potensi pajak daerah tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa Pemerintah Daerah akhirnya mengajukan permintaan kerja sama dengan BPPK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak (Pusdiklat Pajak). Kerja sama tersebut diterjemahkan dalam program Pelatihan Teknis Pajak khusus Pemerintah Daerah. Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah sehingga mampu memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan daerah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Daerah yang ingin turut serta bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak semakin bertambah. Namun, lagi-lagi keterbatasan sumber daya manusia

dan alokasi anggaran kembali menjadi penghalang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pusdiklat Pajak mengalokasikan anggarannya sebesar 10% dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unitnya untuk membantu Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pajak khusus Pemerintah Daerah pada tahun 2018.

Pelatihan Teknis Pajak khusus Pemerintah Daerah terdiri dari Pelatihan Teknis PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pelatihan Teknis Juru Sita Pajak Daerah, dan Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah. Tiga diklat tersebut dipilih dalam rangka mengoptimalkan potensi PBB P2 serta meningkatkan kompetensi juru sita pajak dan pemeriksa daerah yang menjadi faktor utama dalam penegakan hukum di



Tabel I. Desain Kurikulum Pelatihan Teknis Pajak khusus Pemerintah Daerah

	PELATIHAN TEKNIS PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN	PELATIHAN TEKNIS JURUSITA PAJAK DAERAH	PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSA PAJAK DAERAH
TUJUAN	Tujuan yang akan dicapai pada pelatihan adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pegawai Pemda atau Pemkot agar memahami pengetahuan dasar PBB P2 dan keterampilan dasar di bidang pendataan dan penilaian.	Tujuan yang akan dicapai pada pelatihan adalah memberikan kompetensi dasar untuk menjadi juru sita pajak daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Tujuan yang akan dicapai pada pelatihan adalah meningkatkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai instansi Pemerintah Daerah untuk menjadi pemeriksa pajak daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
MATERI	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar-Dasar PBB Pedesaan dan Perkotaan - Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB P2 - Penilaian Objek PBB P2 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan Penagihan Pajak - Administrasi Penagihan Pajak - Aspek Hukum dalam Penagihan Pajak - Pencarian Data Penagihan Pajak - Strategi dan Manajemen Risiko Penagihan Pajak - Komunikasi yang Efektif dalam Penagihan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Overview Pemeriksaan Pajak Daerah - Aspek Hukum dalam Pemeriksaan Pajak Daerah - Metode, Teknik, dan Persiapan Pemeriksaan Pajak Daerah (<i>team teaching</i>) - Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah (<i>team teaching</i>) - Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (<i>team teaching</i>)

bidang perpajakan. Dengan bekal tiga pelatihan tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sektor pajak lainnya, diperkuat oleh Peraturan Daerah masing-masing.

Desain kurikulum Pelatihan Teknis Pajak khusus Pemerintah Daerah diadopsi dari pelatihan serupa yang diselenggarakan untuk para petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan sedikit penyesuaian pada beberapa bagiannya. Selengkapny dapat dilihat pada Tabel I. Untuk melancarkan proses rekrutmen peserta pelatihan, Pusdiklat Pajak berkoordinasi dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BDK juga berperan dalam menyebarkan informasi terkait program pelatihan teknis pajak kepada Pemerintah

Daerah yang diselenggarakan dan didanai oleh Pusdiklat Pajak.

Pada semester I tahun 2018 pelatihan ini berhasil diselenggarakan sebanyak lima angkatan. Sekitar kurang lebih 90 Pemerintah Kota/Kabupaten mengirimkan pegawainya sebagai peserta, dimana sebagian besar peserta pelatihan berasal dari wilayah Pulau Jawa. Dari pelatihan yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi Pusdiklat Pajak terkait kelulusan peserta pelatihan menunjukkan bahwa dari sejumlah 447 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut hanya 4 peserta yang dinyatakan mengulang yang artinya bahwa 99% peserta lulus Ujian. Para peserta juga puas dengan pelayanan penyelenggara. Hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi rata-rata yang

mencapai angka 4.2 dari skala 1 s.d. 5.

Kedepannya, Pusdiklat Pajak berencana mengembangkan kurikulum dengan menambah jam pelatihan untuk praktik. Selanjutnya juga akan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa menjadi tempat *benchmarking* dan *sharing session*. Peserta pelatihan nantinya akan dapat mempraktikkan langsung materi yang telah mereka peroleh di kelas. Selain membuat pemahaman peserta menjadi lebih baik, dengan metode ini peserta diharapkan juga mendapat gambaran langsung dari kegiatan yang dipelajari di kelas. Selain itu, peningkatan kemampuan untuk membangun hubungan dengan Pemerintah Daerah lain pun termasuk salah satu tujuan berikutnya dari pelatihan ini.

Mengingat kelas terdiri dari peserta dengan ragam daerah, diharapkan saat berada dalam kelas para peserta dapat saling berbagi mengenai pengalamannya. Terlebih apabila hal ini dapat berlanjut hingga usai pelatihan. Mereka diarahkan untuk dapat memanfaatkan media elektronik seperti grup *whatsapp* dan *Community of Practice (COP)* sebagai

media komunikasinya. Media komunikasi tersebut diharapkan dapat menjembatani dan memudahkan diskusi peserta sehingga mereka dapat tetap saling membantu ketika mengalami permasalahan di lapangan. Dalam media tersebut para widyaiswara dan pengajar dapat turut berpartisipasi untuk memberikan arahan kepada para peserta.

Pusdiklat Pajak akan terus mengembangkan diri untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, tidak hanya untuk Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak), tetapi juga untuk Kementerian dan Lembaga lainnya termasuk Pemerintah Daerah. Penerimaan negara tidak hanya menjadi tugas Pemeritah Pusat, Pemerintah Daerah juga wajib memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan negara, minimal dengan memenuhi penerimaan daerah masing-masing. Pusdiklat Pajak berharap dengan diselenggarakannya Pelatihan Teknis Pajak khusus Pemerintah Daerah, kompetensi dan mental para petugas pajak daerah terus meningkat. Dengan begitu, penerimaan pajak daerah diharapkan mencapai hasil yang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



ARIMBI PUTRI

MENJAGA KEBERLANJUTAN PUG DI BPPK



Menyegarkan kembali ingatan kita tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kementerian/Lembaga (K/L), yakni merupakan implementasi Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Inpres tersebut K/L berkewajiban mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Agar suatu penyusunan kebijakan dapat mempertimbangkan aspek gender, dukungan pejabat terkait sangat diperlukan.

Setiap tahun Kemenkeu juga mengadakan lomba antarkantor yang mewakili unit eselon I di lingkungan Kemenkeu untuk menjadi kantor terbaik dalam implementasi PUG. Pada 2015 lalu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih juara kedua implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Kementerian Keuangan. Tahun ini, perhelatan antareselon tersebut kembali digelar. Berbeda dengan tiga tahun silam, kini BPPK mendapat tantangan untuk mampu mempertahankan raihan yang berhasil dicapai sebelumnya. Pepatah mengatakan lebih sulit mempertahankan daripada meraih sesuatu.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang mempunyai komitmen tinggi terhadap PUG, BPPK juga turut berperan aktif dalam upaya implementasi PUG tersebut. Mulai dari pemberian pemahaman PUG kepada pegawai BPPK, menyediakan sarana prasarana fisik yang telah mengintegrasikan perspektif gender serta kebijakan yang responsif gender.

Perjalanan implementasi PUG di BPPK yang sudah berjalan lebih dari 13 tahun terbagi dalam beberapa tahap yaitu tahap awal, pengembangan, dan maju.

TAHAP AWAL (2004-2009)

Pada tahap ini BPPK mengikuti koordinasi, sosialisasi, serta terlibat aktif dalam Tim Pokja PUG Kemenkeu. Selanjutnya, perwakilan BPPK mengikuti *training of trainer* (ToT) dengan tema Anggaran Responsif Gender yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Keuangan. Di sana, perwakilan BPPK menjadi *vocal point* terkait PUG.

TAHAP PENGEMBANGAN (2010-2013)

Pada 2010, BPPK menghapus aturan peserta beasiswa perempuan dilarang hamil. Di tahap ini pula dilakukan penyusunan *Gender Budget Statement* BPPK dimulai sejak 2010. Di tahun yang sama, terjadi peningkatan persentase mahasiswa perempuan di STAN (sekarang PKN STAN).

TAHAP MAJU (2013-SEKARANG)

Pada tahap ini cukup banyak hal yang dilakukan BPPK terkait PUG yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, sosialisasi, dan juga memproduksi media publikasi. Implementasi PUG dalam bentuk kebijakan antara lain penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), Rencana Strategis BPPK dan Sekretariat BPPK 2015-2019, pembentukan Tim Implementasi PUG beserta rencana kerjanya, pedoman penyusunan LAKIP yang responsif gender, perbaikan sarana dan prasarana yang responsif gender, serta diperkenalkannya peserta pelatihan yang sedang menyusui untuk membawa bayi dan pengasuhnya di kamar tersendiri.

Selain kebijakan, BPPK juga mengadakan sejumlah sosialisasi dan pelatihan terkait PUG, di antaranya ToT PUG di Tangerang Selatan kepada *trainers* (pejabat eselon IV), April 2015 lalu, sosialisasi PUG kepada seluruh pegawai Sekretariat Badan dan perwakilan Pusdiklat, *capacity building* untuk mahasiswa PKN STAN, seminar Kesehatan Reproduksi pada Agustus 2015, sejumlah seminar Ketahanan Keluarga, dan sosialisasi PUG di BDK Cimahi.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya produksi sejumlah media publikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran PUG. Media publikasi tersebut antara lain pengadaan *standing banner* dan *leaflet* PUG, modul video PUG di laman BPPK-TV pada Comet, *page* khusus pembahasan dan diskusi tentang PUG di Intranet BPPK, *comic strip* di *Page* PUG Edukasi Keuangan edisi 29, Agustus 2015, lomba menulis dengan tema PUG di lingkungan BPPK pada April 2016, serta mengunggah bahan-bahan sosialisasi PUG di intranet BPPK dan juga portal pembelajaran *Kemenkeu Learning Center* (KLC).

Masuknya pegawai baru di BPPK menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pemahaman tentang PUG. Berbagai cara dilakukan agar para pegawai baru

mendapatkan pemahaman tentang PUG. Berangkat dari kondisi itu lah, BPPK kembali gencar menyosialisasikan kembali terkait pemahaman PUG. Terbaru, BPPK menyelenggarakan Seminar Manajemen Keuangan Keluarga pada 28 Juni 2018 lalu yang di dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan materi-materi PUG. BPPK juga berupaya agar implementasi PUG dari tahun ke tahun sudah melekat dalam tugas dan fungsi BPPK.

MENJAWAB TANTANGAN SADAR PUG

Perubahan teknologi komunikasi yang begitu pesat, sedikit banyak mengubah strategi BPPK dalam sosialisasi PUG kepada para pegawai. Jika pada 2015 untuk memberikan pemahaman PUG kepada para pegawai BPPK dilakukan dengan sosialisasi tatap muka, memasang *banner*, mencetak pamflet, serta membuat *page* khusus tentang PUG di intranet BPPK yang di dalamnya berisi slide PUG, video, dan komik PUG. Selain tetap melakukan sosialisasi PUG seperti tahun 2015, tahun ini BPPK juga menggunakan media digital untuk sosialisasi PUG yaitu portal KLC yang dapat diakses di laman www.klc.kemenkeu.go.id.

Strategi ini dilakukan agar dapat lebih cepat memberikan pengetahuan dan pemahaman baik kepada pegawai BPPK maupun masyarakat luas. Sebab, portal KLC juga bias diakses masyarakat secara umum. Selain web, KLC juga tersedia versi *mobile* yang dapat diunduh di Google Play. Hal ini juga untuk menasar para pegawai dari kalangan *millennials* yang identik dengan *gadget*. Penggunaan KLC dirasa lebih efektif dan efisien dalam memberikan pemahaman PUG kepada para pegawai karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Perlu digarisbawahi bahwa PUG tidak sama dengan emansipasi wanita, atau lebih mengutamakan wanita. Pemahaman inilah yang terus dilakukan BPPK kepada seluruh pegawainya agar benar-benar memahami PUG dan manfaatnya. BPPK juga terus memberikan pemahaman

kepada seluruh pegawai bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender tidak sebatas laki-laki dan perempuan, tetapi lebih luas termasuk untuk lansia, anak-anak dan para penyandang disabilitas.

DAMPAK PUG DI BPPK

PUG diimplementasikan pada prinsipnya untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh pegawai dengan tujuan meningkatkan produktivitas pegawai dalam bekerja. Dengan difasilitasinya kebutuhan pegawai laki-laki dan perempuan selama di kantor maka akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pegawai dan pada akhirnya akan memberikan kesetaraan gender.

Pada tahap implementasinya, BPPK yang tugas utamanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana fisik perkantoran yang telah mengintegrasikan perspektif gender seperti ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang pelayanan, kamar asrama bagi difabel, toilet laki-laki, perempuan dan difabel, tempat parkir prioritas, jalur khusus difabel, ruang *daycare*, tempat khusus merokok, ruang dan sarana olahraga, tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan yang responsif gender baik untuk pegawai BPPK maupun peserta pelatihan di BPPK.

Sebagai contoh kebijakan yang responsif gender adalah dahulu sebelum BPPK mengimplementasikan PUG, pegawai perempuan Kementerian Keuangan yang sedang hamil tidak diperkenankan mengikuti seleksi beasiswa. Apabila di tengah seleksi yang bersangkutan diketahui dalam keadaan hamil, maka secara otomatis dinyatakan gugur. Berdasarkan analisis gender yang dilakukan, akhirnya aturan tentang hal tersebut dihapus sehingga para pegawai perempuan Kementerian Keuangan yang sedang hamil dan lulus seleksi beasiswa tetap diberikan kesempatan mengikuti program beasiswa. Mari kita terus terapkan PUG di lingkungan BPPK karena banyak memberikan manfaat. *Salam PUG!*

DODI SEPTARIZA

FITRI MAYANG SARI

“Move Out
of Your
Comfort
Zone”

Terlahir, dibesarkan, dan dididik dari lingkungan yang sederhana, ternyata justru membuat hidupnya kaya pengalaman. Mencermati sederet aktivitas dan pengalaman yang pernah dilaluinya, siapa sangka bahwa perempuan kelahiran Lubuklinggau, Sumatera Selatan ini baru berusia dua puluhan tahun. Pekerjaannya saat ini sebagai staf di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, seakan-akan merupakan refleksi dari seluruh kegiatan dan pengalaman yang pernah dilalui Fitri Mayang Sari, bahkan sejak duduk di bangku sekolah dasar.



Gelora, Karya, Cita & Kemenkeu Muda

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Fitri Mayang Sari telah belajar untuk keluar dari *Comfort Zone* sejak kanak-kanak. Pada saat duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (SD) di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dimana saat itu teman-teman seusianya baru memikirkan bagaimana merajut untaian karet untuk bermain lompat tali, mencuri buah dari pohon tetangga atau sibuk dengan Pekerjaan Rumah (PR) perkalian dan pembagian sederhana, kala itu Fitri sudah mulai merasakan bagaimana mencari uang tambahan penghasilan untuk membantu kedua orang tuanya. Fitri kecil tidak sungkan untuk membawa pempek, nasi gemuk (semacam nasi uduk khas Daerah Lubuklinggau), atau keripik singkong untuk dijual kepada teman-teman di sekolahnya. Tidak saja pandai mengerjakan PR sendiri, Fitri sudah dapat membuat catatan daftar teman-teman yang memesan makanan, untuk dibawakannya pada keesokan hari. Bahkan pada suatu ketika, ia mendapatkan *challenge* yang lebih besar dari orang tuanya. Ayahnya mengantarnya ke suatu tempat wisata, dibekali dengan wadah berisi 50 (lima puluh) bungkus es balon. Selanjutnya, ayahnya meninggalkannya sendiri dengan petunjuk bahwa harga satu bungkus es balon adalah Seratus Rupiah, dan berjanji akan menjemputnya kembali di sore hari. Fitri kecil pertama kalinya merasakan bertemu dengan sekian banyak orang baru sendirian, dan harus berinteraksi dengan menawarkan dagangan, tentu saja ia amat gugup. “Rasanya mau menangis saja saat itu”, kenang Fitri. Alhasil, ketika sore hari ayahnya menjemputnya, es balonnya hanya berkurang tiga bungkus, dan uang yang terkumpul hanya tiga ratus rupiah. Namun, tak disangkanya

bahwa ayahnya justru tersenyum bangga, “Tidak apa-apa, kamu hebat sudah berani berjualan sendirian. Ternyata mencari uang itu tidak mudah, bukan?”, sambut ayahnya kala itu sembari mengangkat kembali wadah es yang masih penuh. Kejadian itu membekas sekali di ingatannya sebagai salah satu cara dari orang tuanya untuk melatih keberanian, menghargai uang dan tidak bergantung kepada orang tua.

Karena tidak pernah dimanjakan oleh orang tua, dan selalu dituntut untuk mandiri dengan diberikan beban tanggung jawab sesuai usianya, Fitri kecil tumbuh dengan kepribadian yang menarik, pandai bergaul dan berkomunikasi. Hal itulah yang membuat guru-guru di SD-nya sering menunjuknya untuk menjadi perwakilan lomba-lomba. Meskipun bukan siswa peringkat satu di sisi akademis, ia sering ditunjuk sebagai perwakilan lomba siswa teladan, lomba mata pelajaran, lomba cerdas cermat, bahkan lomba membaca puisi. Prestasinya pun tidak mengecewakan, beberapa lomba dimenangkannya, bahkan sampai ke tingkat kota.

Kebiasaan sejak SD untuk mengikuti lomba, ternyata berlanjut di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia kembali mengikuti lomba siswa teladan, dan mendapat nilai lebih karena kemahirannya dalam berpidato bahasa Inggris.

Di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ia belajar ilmu baru, yaitu ilmu komputer, dan berani mencoba mengikuti olimpiade komputer serta menyabet gelar juara baik di tingkat kota maupun propinsi. Tidak seperti



di masa-masa sekolah sebelumnya dimana ia hanya mengikuti lomba-lomba yang bersifat akademis dan sudah terbiasa meraih kejuaraan, di masa remajanya ia kembali mencoba keluar dari *Comfort Zone* dengan banyak mengikuti lomba-lomba olah raga seperti bolla *volley*, basket, senam, pencak silat dan gerak jalan. Dari mengikuti lomba-lomba yang bersifat grup/ kelompok seperti itulah, dia mempelajari cara bekerja dalam tim. Bahwa dalam *teamwork*, tidak dibutuhkan satu individu yang sangat hebat, melainkan individu-individu yang dapat bekerja sama dan menaati *rules*, untuk mewujudkan tujuan yang sama.

GELORA KEMENKEU MUDA!

Meskipun secara formal tidak pernah

menempuh pendidikan di bidang komunikasi, namun dapat dibilang ia berhasil menghayati pekerjaannya saat ini sebagai staf Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI), Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan. Selain bekerja, saat ini Fitri bersama rekan-rekan lintas eselon I baik di pusat maupun di daerah aktif berkomunikasi dalam suatu wadah komunitas pegawai yang dinamakan Kemenkeu Muda.

Meskipun kehadirannya masih tergolong baru, forum Kemenkeu Muda telah melalui proses yang cukup panjang. Menilik dari sejarah terbentuknya, Kemenkeu Muda merupakan ide kolektif sejumlah pegawai muda dari seluruh unit eselon I di Kemenkeu yang memiliki semangat sama untuk berkolaborasi,

berkontribusi dan berinovasi. Berawal dari Dessy, pegawai muda BKF, yang pernah memiliki kesempatan menyampaikan ide penyelenggaraan *Youth Conference* kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selang beberapa waktu, Dessy kembali memiliki kesempatan bertemu Ibu Menteri dan ternyata beliau masih mengingat ide yang disampaikan oleh Dessy tentang *Youth Conference*. Beranjak dari hal tersebut Dessy beserta rekan-rekannya di BKF Muda berinisiatif untuk mengumpulkan perwakilan pegawai dari setiap eselon I guna membahas penyelenggaraan *Youth Conference* tersebut.

Namun mempertimbangkan waktu, pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, akhirnya disepakati untuk



Fitri Mayang Sari dalam acara Penganugerahan Duta Transformasi Kelembagaan Terbaik 2017

menyelenggarakan forum kecil terlebih dahulu dengan bekerja sama dan menggunakan platform *Mezzanine Club*, komunitas pegawai Kemenkeu yang telah lebih dulu ada dan berpengalaman dalam penyelenggaraan acara.

Pada mulanya, hanya menargetkan terselenggaranya forum kecil, yang menyatukan beberapa aktivitas golongan muda di beberapa eselon I Kementerian Keuangan. Tujuannya pada saat itu sederhana, sinergi generasi muda antar eselon dan menghilangkan sekat-sekat yang selama ini seolah-olah terbentuk karena tidak adanya komunikasi satu sama lain. Pada saat itu, mereka menargetkan seratus sampai tiga ratus orang dapat bergabung di forum yang akan diselenggarakan tersebut.

Mewakili rekan-rekan, kemudian Fitri menyampaikan gagasan tersebut kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Bapak Nufransa Wira Sakti, beliau justru memberikan arahan untuk menyelenggarakan forum yang jauh lebih besar, dengan target seribu peserta. Beliau mempertimbangkan bahwa kesempatan bertemu Ibu Sri Mulyani bagi pegawai muda pasti akan memberikan banyak

pengaruh positif dan semangat baru, sehingga sayang apabila forum tersebut hanya dibatasi bagi tiga ratus pegawai.

Arahan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Fitri dan teman-temannya. “Saya pribadi pada awalnya pesimis bisa mengumpulkan sampai seribu orang dalam forum yang dapat dibilang merupakan debut ini”, urai Fitri. Namun, tanpa menyia-nyiakan waktu, Fitri dan teman-temannya mulai bergerak dengan tenaga dua kali lipat dari rencana semula. Dessy (BKF) dan Fitri yang bertindak sebagai *co-project manager* memotivasi tim yang berisi 80 orang tersebut agar menghadapi tantangan dengan positif dan fokus pada tujuan, yakni membuat acara yang menarik dan mengundang antusiasme pegawai Kementerian Keuangan, khususnya generasi muda. Tidak ada pilihan selain bahwa acara tersebut harus berhasil. “Teman-teman, kapal sudah dibakar, tidak ada jalan pulang selain menang,” kenang Fitri menyemangati timnya. “Saat itu saya terinspirasi dengan kisah perjuangan Thariq bin Ziyad menuju Andalusia. Thariq membakar kapal-kapal yang digunakan pasukannya untuk menyebrang

Selat Gibraltar sehingga pasukannya tidak memiliki pilihan selain mati atau memenangkan peperangan,” lanjutnya.

MENYEBARKAN SEMANGAT MUDA KE PENJURU NEGERI

Dalam penyelenggaraan forum tersebut, kami banyak mendapatkan arahan dari Biro KLI baik dalam tataran konsep maupun implementasi. Sebagai pegawai muda, kami merasa sangat senang mendapati unit kerja dan pimpinan di Kemenkeu begitu terbuka untuk diskusi dan bersedia membimbing dengan baik. Salah satu masukan yang kami terima ialah untuk menyatukan nama penyelenggara dari 11 unit eselon I agar menjadi lebih inklusif, sinergi dan kolaboratif. Dari sanalah lahir nama KEMENKEU MUDA, sementara acaranya sendiri dinamakan *Exclusive Forum Bersama Menteri Keuangan*.

Pada masa pendaftaran, rencana penyelenggaraan forum tersebut direspon oleh 1.300 (seribu tiga ratus) orang pendaftar. Panitia semakin percaya diri karena audiens yang bersemangat untuk berpartisipasi dalam forum tersebut

jauh melebihi ekspektasi. Hal tersebut sebenarnya juga menjadi beban tersendiri, karena mengemban amanat dari 1.300 orang calon peserta yang menaruh harapan tinggi pada forum tersebut.

Sebenarnya, *Exclusive Forum* Bersama Menteri Keuangan yang terlaksana pada 24 November 2017 tersebut dimaksudkan terselenggara secara eksklusif, satu kali selesai. Namun demikian, mengingat pada saat pelaksanaan acara, banyak audiens menangkap bahwa forum tersebut merupakan *launching* dari kegiatan Kemenkeu Muda. Diikuti apresiasi yang tinggi dari banyak pihak, siapa sangka forum tersebut pun berubah menjadi cikal bakal komunitas pegawai muda Kemenkeu. Fitri ingat betul saat itu Ibu Sri Mulyani berpesan, “kalian saling menyemangati ya, terutama kepada teman-teman yang berada di daerah, supaya mereka tidak putus asa dan menyadari bahwa kita ada, kita saling membantu dan memberikan dukungan.” Setelah itu, kami mempunyai gagasan untuk menyebarkan semangat Kemenkeu Muda kepada teman-teman di daerah, yaitu dengan membentuk *chapter-chapter*. Kami membantu teman-teman di daerah untuk merealisasikan pembentukan *chapter-chapter* tersebut. Kami mencoba menghubungkan mereka, yaitu satu atau beberapa provinsi diwadahi dalam satu *chapter*.

Saat ini, terdapat 18 (delapan belas) *chapter* Kemenkeu Muda, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Aceh
2. Sumut
3. Riau, Kepri, Sumbar, Jambi
4. Lampung, Bengkulu
5. Sumsel, Babel
6. Banten
7. Jakarta (Penggerak Pusat)
8. Jabar
9. Jateng, DIY
10. Jatim
11. Kalsel, Kalteng
12. Kalbar

13. Kaltara, Kaltim
14. Sulsel, Sulbar, Sulteng
15. Sulut, Gorontalo
16. Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
17. Bali
18. Nusa Tenggara

Sejumlah *chapter* tersebut digerakkan sekitar 100 orang Pegawai Kemenkeu di daerah.

Dengan mengusung nilai KOLABORASI, KONTRIBUSI dan INOVASI, Kemenkeu Muda diharapkan dapat menjadi wadah sinergi bagi seluruh pegawai Kemenkeu untuk saling mengenal lintas unit kemudian berkerjasama. Sejatinya tidak hanya melibatkan pegawai berusia muda, karena pegawai senior pun diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan sifat kebijaksanaan yang seringkali belum dimiliki pegawai muda. Kemudian menjadi tempat bagi pegawai Kemenkeu untuk mengasah dan mengembangkan diri serta mengoptimalkan kapasitasnya agar menjadi kontribusi bagi kinerja Kemenkeu yang semakin baik, melalui karya-karya inovasi. Terakhir, menjadi jembatan bagi seluruh pegawai Kemenkeu (baik antara pimpinan dan pelaksana, maupun antar pelaksana) sebagai satu keluarga besar yang saling mendukung dan menyemangati dalam bekerja serta saling mengingatkan dalam menjaga integritas dan profesionalisme.

Kemenkeu Muda bagi sebagian orang, merupakan komunitas yang telah dirindukan kehadirannya bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada akhirnya dapat diwujudkan, program Kemenkeu Muda ke depan akan berfokus pada empat hal, yaitu:

Upskilling program: kegiatan rutin yang akan menjadi *core* dari Kemenkeu Muda *sharing session* dan *workshop* mengenai berbagai bidang dan mengundang pembicara/ahli baik dari internal kemenkeu maupun dari luar.

Research program: penelitian ilmiah terkait keuangan dan ekonomi maupun manajemen institusi sebagai sarana

menyampaikan pemikiran dan diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi.

Social program: untuk membangun jiwa peduli kepada sesama, kegiatan direncanakan 1-2 tahun sekali dan insidental seperti penggalangan dana pada saat terjadi bencana.

Collaboration program: kegiatan kolaborasi baik dengan pihak internal maupun eksternal kemenkeu sebagai upaya sinergi dan membangun hubungan baik.

KERJA SAMA DALAM KARYA UNTUK MERAH CITA

Keberhasilan Fitri mengomandani terselenggaranya *Exclusive Forum* Bersama Menteri Keuangan pada 24 November 2017 lalu, dan membidani lahirnya komunitas Kemenkeu Muda beserta delapan belas *chapter* yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak terlepas dari perjalanan panjangnya terlibat dalam berbagai organisasi. Dimulai sejak belia, dengan aktif dalam berbagai ekstrakurikuler di sekolah, talentanya dalam berorganisasi, bekerja dalam *teamwork* semakin matang di bangku kuliah. Memasuki bangku kuliah dengan penuh kebanggaan, karena popularitas nama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) begitu harum di kampung halamannya, Fitri tidak menghabiskan waktunya hanya untuk belajar. Berasal dari kota kecil di Sumatera Selatan, dan baru kali pertama menginjakkan kaki di Pulau Jawa, tidak membuatnya merasa rendah diri dalam pergaulan. Kemampuannya berkomunikasi dengan baik, membuatnya mudah untuk menjadi aktivis di berbagai organisasi kampus. Mulai dari organisasi yang bersifat religius seperti Masjid Baitul Maal (MBM) dan mengajar Taman Pendidikan Alquran (TPA) di pemukiman pemulung, sampai menjadi penyiar IC Radio di kampus pernah digelutinya. Baginya, setiap organisasi, mempunyai benang merah, yaitu *teamwork*, memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Organisasi BEM yang diikutinya, tentu memberikan pengalaman yang berbeda dengan aktif



di kepanitiaan *event* Dinamika pada tiga tahun berturut-turut. Secara umum, dari semua organisasi yang diikutinya, Fitri belajar mengenal karakter orang, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.

Semangatnya dalam berorganisasi, diimbangi dengan tekadnya untuk terus mengasah otak, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun sudah bergelar Sarjana, setelah lima tahun resmi bekerja sebagai PNS, Fitri memutuskan untuk mengikuti perkuliahan D4. Saat libur semester, dimana pada umumnya mahasiswa lain menghabiskan waktu di kampung halaman, Fitri memilih hal yang berbeda. Saat libur kuliah semester I, Fitri menjadi *volunteer* di Pulau Messah, Flores, NTT. Di Pulau tersebut, tinggal sekitar 1.000 (seribu) jiwa penduduk, dalam keterbatasan air, listrik, dan bahkan pohon. Meskipun terbiasa hidup dalam kesederhanaan di masa kecilnya, Fitri tidak menyangka bahwa kehidupan

orang-orang dan khususnya anak-anak di Pulau Mesah, jauh lebih sederhana dan sulit. Pada saat itu ia mengaktifkan kegiatan taman bacaan di daerah tersebut, untuk menumbuhkan minat baca anak-anak di Pulau Messah.

Lain halnya pada libur semester berikutnya, ia berniat mengisinya dengan sesuatu yang *fun*. Dengan dana 35 juta rupiah, Fitri membulatkan tekad untuk menaklukkan Eropa. Menjadi suatu pencapaian tersendiri baginya, ketika dana sejumlah tersebut bisa membuatnya tinggal di Eropa selama 34 hari, dengan berkeliling dan menikmati keindahan 17 kota di 4 negara. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari jaringan pertemanan yang telah dibangunnya selama ini. Berkat keaktifannya pula di luar kegiatan kampus, seperti mengikuti Kelas Inspirasi, maupun sebagai co-founder komunitas Hollaback! Jakarta, Fitri banyak berkenalan dengan orang-orang dari berbagai negara. Dengan tujuan

awal untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing, ternyata di kemudian hari teman-teman asing yang dikenalnya di Indonesia itulah yang membantu keberhasilannya *travelling* di Eropa selama 34 hari dengan dana minim. Selama di Eropa, secara bergantian teman-temannya tersebut memberikan tumpangan, sehingga dana yang dipersiapkannya tidak membengkak. Hal yang tidak selalu mudah dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang mudah bergaul dan bersosialisasi.

WHEN EVERYTHING BECOMES POSSIBLE. WHEN GOD MAKES IT SIMPLE

“Mengetahui banyak orang dari latar belakang yang berbeda membantu mengubah perspektif saya atas banyak hal,” ujar Fitri yang sempat pesimis di awal-awal dia bekerja sebagai PNS karena kekhawatiran tidak dapat mengembangkan diri jika menjadi

bagian dari birokrasi, ternyata keraguan tersebut dipatahkannya sendiri. Pandangan-pandangan yang selama ini melekat tentang birokrasi, ternyata tidak selamanya benar, semua kembali kepada pribadi masing-masing orang. Hal-hal yang seringkali dianggap sulit, bahkan mustahil, ternyata berhasil dilakukannya. Baginya kini, “daripada mengeluhkan birokrasi, bagaimana kalau kita mencoba memperbaiki bersama. Hmm.. *at least we do something*”. Segudang kegiatan yang diikutinya selain mengemban tugas sebagai abdi negara, seperti menjadi pengajar *volunteer* bahasa Inggris, Mezzanine Club, Australia-Indonesia Youth Association (AIYA), menjadi narasumber stasiun TV swasta nasional, dan beberapa tulisan yang dipublikasikan di lingkungan STAN maupun Kementerian Keuangan, merupakan pembuktian bahwa pengembangan diri bukan merupakan masalah tempat dimana

seseorang bekerja, melainkan seberapa besar tekad seseorang untuk berkembang. Pada akhirnya, Fitri bersyukur bahwa perjalanan hidupnya ditakdirkan menjadi seorang abdi negara.

Meskipun sudah lama tinggal di Jakarta, dan bahkan berkeliling ke berbagai negara, ternyata bakso di kampung halamannya, Lubuklinggau tetap menjadi makanan favoritnya. Di sela-sela aktivitasnya, Fitri memaksakan diri untuk selalu sempat membaca dan melakoni hobi menyanyinya. “Saya berharap bisa menjadi bagian dari perubahan birokrasi di Indonesia, *mindset* masyarakat bahwa birokrasi itu lambat, ribet dan stagnan, ingin Saya ubah”, tekadnya. Berbekal motto “*When everything becomes possible. When God makes it simple*”, Fitri selalu merasa *enjoy* menjalani setiap tanggung jawab yang diembannya.

“Mengenal banyak orang dari latar belakang yang berbeda membantu mengubah perspektif Saya atas banyak hal”



Serambi Ilmu

Mohamad Jafar

MEMAHAMI MAKNA
“PENETAPAN” PADA
UNDANG-UNDANG
KEPABEANAN

Frenda Nic Qomar Ernanto

KESIAPAN DAN
TANTANGAN
IMPLEMENTASI
*AUTOMATIC EXCHANGE
OF INFORMATION (AEOI)*
UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN

Dani Ramdani

KURIKULUM BAGI
GENERASI MILENIAL

MOHAMAD JAFAR
WIDYAISWARA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

MEMAHAMI MAKNA “PENETAPAN” PADA UNDANG-UNDANG KEPABEANAN

ABSTRAK

Pejabat berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean yang diberitahukan importir. Direktur Jenderal berwenang menetapkan kembali tarif dan nilai pabean yang diberitahukan importir. Kewenangan penetapan kembali diperlukan karena dimungkinkan adanya hak negara yang belum terpenuhi karena waktu untuk penelitian dan penetapan oleh pejabat relatif singkat. Kewenangan penetapan kembali juga diperlukan karena teknik pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif sehingga dimungkinkan pemberitahuan impor diterima terlebih dahulu sebelum dilakukan penetapan oleh pejabat, selanjutnya dilakukan penelitian ulang atau audit.

Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) mengatur tentang pengawasan barang impor dan ekspor serta wewenang aparat pabean dalam pengawasan dan pelayanan barang-barang tersebut. Beberapa kewenangan yang berkaitan dengan masuknya barang impor adalah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan baik dokumen maupun fisik barang, kewenangan menetapkan tarif dan/atau nilai pabean, serta kewenangan menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean untuk telah dilakukan dengan tepat.

PENETAPAN PEJABAT

Pada Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan disebutkan bahwa pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan nilai pabean terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dalam hal penetapan tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan, kecuali jika importir mengajukan keberatan. Pada tataran praktis bentuk penetapan pejabat bea dan cukai adalah Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

Pada penjelasan Pasal 16 tersebut disebutkan bahwa penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara *self assesment* hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi. Penetapan juga dapat dilakukan dalam hal bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.

Frasa hanya dilakukan pada penjelasan Pasal 16 di atas seharusnya dimaknai bahwa penetapan hanya dilakukan dalam

hal saat penelitian kedapatan tarif dan/atau nilai pabean berbeda dengan yang seharusnya.

PENETAPAN KEMBALI

Pada Pasal 17 Ayat 1 UU Kepabeanan disebutkan bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Pada tataran praktis bentuk penetapan kembali Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).

Selanjutnya pada Ayat 2 disebutkan dalam hal penetapan tersebut berbeda dengan penetapan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.

Pada penjelasan Ayat 1 Pasal 17, disebutkan bahwa pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.

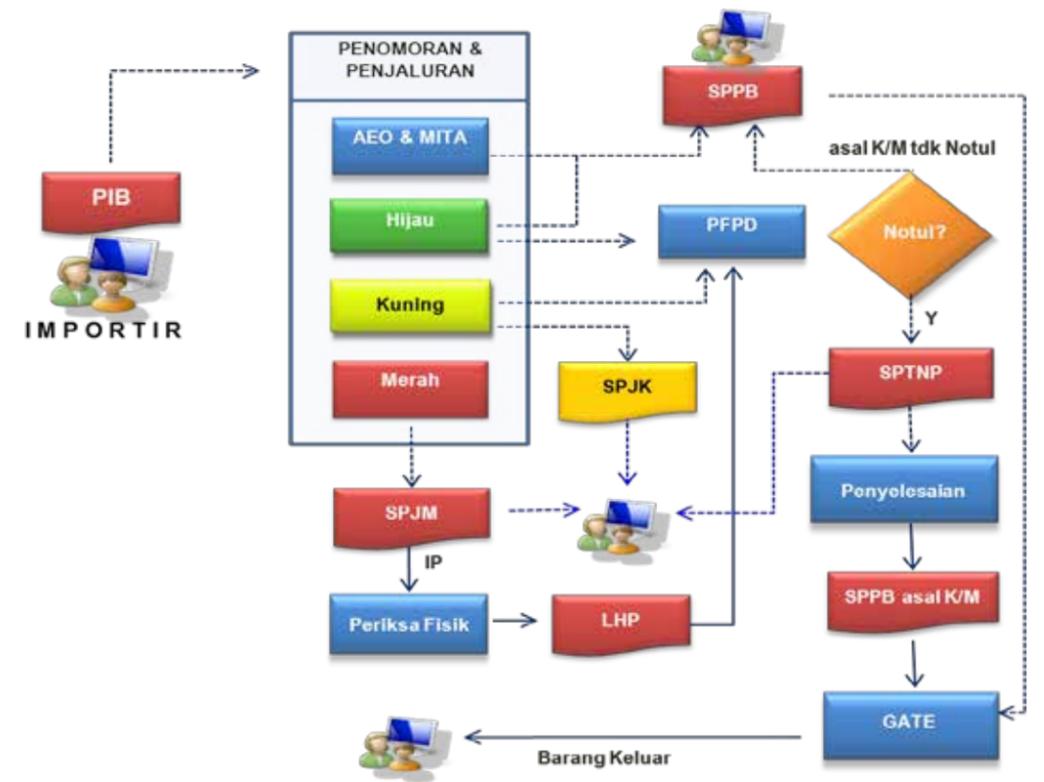
BANDING ATAS PENETAPAN KEMBALI

Beberapa SPKTNP telah diajukan banding ke Pengadilan Pajak oleh importir dengan alasan penetapan kembali yang

tidak didahului penetapan sebelumnya (SPTNP) dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dari beberapa kasus yang diajukan banding telah mendapat putusan dimana sebagian putusan banding tersebut berisi menerima permohonan banding dari importir, sehingga kasus ini berpotensi menjadi masalah yang serius dikemudian hari. Dampak dari pemahaman bahwa penetapan kembali yang tidak didahului dengan penetapan sebelumnya tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak dapat berimplikasi secara luas tidak hanya pada penerimaan negara namun juga pada proses bisnis penyelesaian barang impor. Hal ini karena prinsip manajemen risiko pada UU Kepabeanan yang diwujudkan dalam tata laksana kepabeanan di bidang impor yang saat ini berlaku mengatur bahwa sebagian importir yang mendapatkan jalur

pelayanan khusus pemeriksaan pabeannya dilakukan melalui mekanisme penelitian ulang atau audit. Jika SPKTNP harus didahului dengan SPTNP, maka PIB oleh importir jalur khusus (MITA dan AEO), jika terdapat kekurangan bea masuk yang harus dibayar tidak dapat ditagih.

Pada Pasal 3 UU Kepabeanan disebutkan bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean, dimana pemeriksaan pabean tersebut meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Mengingat begitu banyaknya barang impor yang harus diperiksa dan terbatasnya sumber daya maka pemeriksaan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Fungsi pemeriksaan pabean dijelaskan pada Pasal 85 UU Kepabeanan yaitu sebagai dasar pejabat bea dan cukai memberikan



Gambar 1. Alur Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelayanan dan Pengawasan Barang Impor

KESIAPAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* (AEOI) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

persetujuan impor setelah pemberitahuan pabean memenuhi persyaratan untuk diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Berikut disampaikan alur penerapan manajemen risiko dalam pelayanan dan pengawasan barang impor. Sesuai Gambar 1, untuk jalur merah atau kuning Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) akan diterbitkan sistem aplikasi jika dalam penelitian dokumen atau barang telah sesuai. Dalam hal jalur hijau, SPPB akan diterbitkan secara langsung oleh aplikasi selanjutnya dilakukan penelitian dokumen dalam waktu paling lama 30 hari sejak PIB diberi nomor pendaftaran. Mekanisme pelayanan dan pengawasan untuk jalur Mitra Utama (MITA) dan *Authorized Economic Operator* (AEO) adalah langsung diterbitkannya SPPB, selanjutnya penelitian atas tarif dan/atau nilai pabean dilakukan melalui mekanisme audit dalam waktu paling lama 2 tahun sejak PIB diberi nomor pendaftaran. Dalam hal kedatangan salah tarif dan/atau nilai pabean akan diterbitkan SPKTNP.

Untuk jalur merah, kuning, dan hijau penelitian ulang juga dapat dilakukan dalam hal terdapat data yang objektif dan terukur adanya kesalahan tarif dan /atau nilai pabean. Jangka waktu penelitian ulang sama dengan jalur MITA dan AEO yaitu paling lama 2 tahun sejak PIB mendapat nomor pendaftaran. Dalam hal kedatangan salah tarif dan/atau nilai pabean akan diterbitkan SPKTNP.

MAKNA PENETAPAN

Berkaitan dengan topik pembahasan, muncul pertanyaan penting: apakah penetapan harus selalu dalam bentuk surat penetapan (SPTNP) oleh pejabat bea dan cukai? Apakah penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (SPKTNP) harus didahului dengan surat penetapan (SPTNP)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya Pasal 10B UU Kepabeanan telah memberikan jawaban yang cukup jelas. Pada Pasal 10B Ayat 2 disebutkan bahwa barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya. Selanjutnya pada Pasal 10B Ayat 4 disebutkan bahwa barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai. Pada penjelasan Ayat 4 diuraikan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan pejabat bea dan cukai yaitu penetapan pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dipenuhi kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini. Bentuk penetapan untuk barang impor melalui pos atau jasa titipan dalam hal diberikan izin pengeluaran barang adalah berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) atau bentuk persetujuan lainnya.

Dengan membaca uraian pada penjelasan Ayat 4 Pasal 10B UU Kepabeanan tersebut kiranya jelas bahwa salah satu bentuk penetapan pejabat adalah berupa persetujuan pengeluaran barang impor. Dengan memahami makna penetapan juga meliputi persetujuan pengeluaran, maka SPPB yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai/aplikasi pada tatalaksana kepabeanan dibidang impor juga merupakan penetapan. Dengan demikian SPKTNP tanpa didahului SPTNP memiliki dasar hukum yang jelas dan selaras dengan prinsip UU Kepabeanan.

SIMPULAN

Memahami istilah penetapan pada UU Kepabeanan harus memperhatikan seluruh makna penetapan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Memahami istilah penetapan pada UU Kepabeanan juga harus melihat secara utuh proses bisnis kepabeanan yang diatur pada undang-undang dimaksud, dimana

pemeriksaan pabean didasarkan pada manajemen risiko dengan memperhatikan hak keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK. 04/2011

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 Pemerintah melakukan terobosan kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan perbaikan *database* perpajakan dengan menggulirkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari sekitar 36 juta wajib pajak, terdapat 965.983 wajib pajak yang mengikuti program dimaksud. Realisasi uang tebusan dari wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* mencapai Rp114,46 Triliun dengan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.036 triliun dan harta dalam negeri menembus Rp3.697 triliun.¹ Angka-angka ini menunjukkan bahwa selama ini terdapat ribuan triliun harta wajib pajak yang masih belum dilaporkan dan tidak pula terdeteksi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Di sisi lain, berdasarkan data *Tax Justice Network* (2012), *wealth flight* dari Indonesia diperkirakan mencapai USD331 Miliar². Data lain yang dirilis

Global Financial Integrity (2015) juga menempatkan Indonesia sebagai negara *top 10* dengan *illicit financial outflows* terbesar yaitu mencapai USD181 miliar dalam rentang tahun 2004-2013.³ Artinya, masih terdapat ribuan triliun harta wajib pajak lagi yang tetap “disembunyikan” di luar negeri dan belum dilaporkan dalam *tax amnesty*. Oleh karena itu, untuk dapat menjangkau dan meningkatkan akses atas harta yang berada di luar negeri tersebut, dibutuhkan keterbukaan informasi yang sifatnya lintas negara. Kebutuhan ini telah menjadi perhatian serius dan komitmen berbagai negara di dunia sebagai upaya untuk memerangi upaya penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang dilakukan secara agresif.

TUJUAN PENULISAN DAN RUMUSAN PERMASALAHAN

Dalam kondisi perekonomian dunia yang saling terhubung sekarang ini, isu pajak bukan lagi sekadar monopoli satu yurisdiksi. Praktik penghindaran pajak

Revisited: Appendix III-Key Charts. Tax Justice Network

³ *Spanjers, Joseph dan Dev Kar. 2015. Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2004-2013. Global Financial Integrity*

dan perencanaan pajak yang dilakukan secara agresif telah dilakukan melewati batas antar negara. Praktik-praktik demikian bukan hanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan perpajakan, melainkan juga menggerus basis pemajakan di banyak negara.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan negara-negara anggota G20 sejak lama telah menyadari fenomena ini. Isu transparansi dan pertukaran informasi terkait perpajakan menjadi salah satu isu utama yang dibahas secara global. OECD kemudian merilis beberapa skema keterbukaan informasi tersebut, yaitu pertukaran informasi secara spontan, berdasarkan permintaan, dan secara otomatis. Dalam implementasinya, perkembangan perekonomian yang semakin cepat menuntut pertukaran informasi perpajakan yang lebih dinamis dan mencakup banyak negara. Oleh karena itu, pada tahun 2014 OECD merilis Standar Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis untuk Kepentingan Perpajakan (*Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*).⁴

⁴ *Disarikan dari bagian Pendahuluan Standard*

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan dan tantangan Indonesia dalam mengimplementasikan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk kepentingan perpajakan di atas. Untuk mencapai tujuan tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini meliputi:

Bagaimana kesiapan Indonesia dalam implementasi AEOI?

Apa saja tantangan dalam mengimplementasikan AEOI?

Studi yang digunakan merupakan studi literatur, yaitu dilakukan dengan mencari referensi yang relevan berdasarkan sumber-sumber tulisan yang ada, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, rilis dari OECD, maupun perkembangan informasi terkini terkait AEOI. Selanjutnya, berdasarkan referensi-referensi tersebut akan dikaitkan dengan kebijakan atau langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan otoritas pajak Indonesia sehingga dapat diperoleh informasi kesiapan Indonesia dalam menerapkan AEOI, termasuk tantangan penerapannya. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi di bidang akademis untuk memperkaya informasi mengenai persiapan dan tantangan implementasi AEOI di Indonesia serta kebijakan yang telah maupun dapat diambil oleh regulator untuk menjawab tantangan tersebut.

PEMBAHASAN

Kesiapan Implementasi AEOI

Keseriusan Indonesia dalam melaksanakan AEOI ditandai dengan ditandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) pada tanggal 3 Juni 2015 di Kantor Pusat OECD di Paris yang di dalam *Annex F*-nya mencantumkan *intended first information exchange* bagi Indonesia dimulai pada September 2018. Penandatanganan MCAA ini merupakan

salah satu dari 4 (empat) tahapan atau prasyarat utama mengikuti AEOI.⁵

Persyaratan pertama yang harus dipenuhi Indonesia adalah terkait dengan dasar perjanjian internasional yang menjadi landasan AEOI. Pada tanggal 3 November 2011 bertempat di Cannes (Perancis), Indonesia telah menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* atau “MAC” (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) dan telah dilakukan pengesahan melalui Peraturan Presiden No. 159 Tahun 2014. Penandatanganan MCAA merupakan salah satu instrumen perjanjian bersifat multilateral yang dilaksanakan berdasarkan MAC ini untuk memfasilitasi terwujudnya AEOI. Selain itu, Indonesia juga menempuh kesepakatan bilateral dalam bentuk *Bilateral Competent Authority Agreement* (BCAA), misalnya dengan Hongkong pada 16 Juni 2017. Indonesia juga memiliki perangkat perjanjian internasional lainnya terkait perpajakan, seperti Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dan Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan atau *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA).

Kedua, Indonesia harus mempunyai *legal basis* domestik guna melaksanakan AEOI, baik berupa legislasi primer setingkat UU maupun legislasi sekunder yang lebih teknis. Perangkat hukum tersebut diperlukan guna mewajibkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan

5 Hingga 15 Januari 2018 telah ada 98 negara dan yurisdiksi yang menandatangani MCAA dengan pelaksanaan AEOI pertama kali dimulai pada tahun 2017, 2018, atau 2019. Uraian lebih detail mengenai keempat persyaratan AEOI disajikan pada Part I *Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters - Implementation Handbook (2nd edition)* yang dapat diunduh di <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.pdf>

dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dan sekaligus memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkan informasi dimaksud dengan negara lain.

Legislasi primer yang dimiliki Indonesia saat ini adalah UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU 9/2017). Salah satu poin utama dalam UU 9/2017 tersebut adalah kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana diatur pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Komoditi Berjangka, dan UU Perbankan Syariah dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan UU dimaksud. Hal ini berarti melalui UU ini diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan AEOI, kerahasiaan informasi tersebut ditiadakan dan lembaga keuangan wajib menyampaikan informasi keuangan kepada DJP untuk dipertukarkan dengan negara mitra. Untuk legislasi sekunder, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya PMK-19). PMK-19 ini memberikan panduan detail mengenai prosedur dan jenis informasi yang harus disampaikan kepada DJP dalam rangka pelaksanaan AEOI.

Ketiga, tersedianya sumber daya dan infrastruktur teknologi dan informasi (TI). Penggunaan TI diperlukan sebagai sarana transmisi data yang aman untuk menerima informasi keuangan dari lembaga keuangan ke otoritas pajak, mengolah informasi tersebut, dan mengirimkan informasi tersebut ke negara mitra. Sebaliknya, sistem TI juga memfasilitasi arus data keuangan yang diterima dari negara mitra. Untuk keperluan tersebut, Indonesia

menggunakan *Common Transmission System* (CTS) yang dikembangkan OECD.⁶

Terakhir, kerahasiaan dan perlindungan data (*confidentiality and data safeguards*). Kerahasiaan data ini juga telah diatur dalam UU 9/2017 dan PMK-19. Dalam peraturan dimaksud dinyatakan bahwa informasi yang diterima dari lembaga keuangan akan digunakan sebagai basis data perpajakan DJP dan akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu juga telah diatur sanksi pidana kepada petugas pajak yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi-informasi dimaksud kepada pihak yang tidak berwenang.

Langkah cepat dan strategis yang dilaksanakan pemerintah di atas juga dilatarbelakangi status Indonesia dalam *Exchange of Information on Request* (EOIR) *rating* tahun 2017 yang masih berada pada status *partially compliant* karena dianggap masih adanya pembatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. *Rating* tersebut menjadikan Indonesia rawan dimasukkan ke dalam negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*fail to meet its commitment*) bahkan menjadi *non-cooperative jurisdictions*.⁷ Namun demikian, dengan mempertimbangkan

6 Kementerian Keuangan. 2018. APBN Kita: Kinerja dan Fakta (Edisi Maret 2018). Diunduh pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/media/9676/apbn-kita-edisi-maret-2018.pdf>

7 Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal OECD ke Menteri Keuangan G20 di Tiongkok (23-24 Juli 2016), OECD dan G20 memberikan benchmark bahwa agar suatu negara tidak dikategorikan sebagai *non-cooperative jurisdiction*, setidaknya harus memenuhi 2 dari 3 kriteria berikut:

- “Largely Compliant” rating with respect to the EOIR standard;
- a commitment to implement the AEOI standard, with first exchanges in 2018 (with respect to the year 2017) at the latest; and
- Participation in the multilateral Convention or a sufficiently broad exchange network permitting both EOIR and AEOI.

langkah-langkah yang telah ditempuh di atas, Indonesia telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Menilik hal ini, Indonesia dapat dikatakan sudah siap dalam mengimplementasikan AEOI September 2018 nanti, baik dari sisi legal, administratif, maupun dari sisi sistem informasi dan kerahasiaan data.

TANTANGAN IMPLEMENTASI AEOI

Ditengah berbagai persiapan yang dilakukan, terdapat beberapa tantangan dalam rangka implementasi AEOI. Tantangan pertama sebagaimana dinyatakan oleh Urinov (2015) adalah terkait dengan kemauan politik (*political will*) dari negara-negara yang akan melaksanakan AEOI. Walaupun negara-negara dimaksud telah menyatakan komitmennya dalam AEOI, namun hal ini tidak akan terlepas dari sisi politis yang ada di negara tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah melaksanakan AEOI dengan berlandaskan pada *The Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) sejak tahun 2015 sehingga lebih awal dibandingkan MCAA yang dirilis OECD. FATCA ini selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian bilateral *Intergovernmental Agreement* (IGA).⁸ Dengan demikian, negara yang akan melakukan AEOI dengan Amerika Serikat akan menyusun perjanjian bilateral IGA tersebut. Penyusunan perjanjian bilateral tentu melibatkan kemampuan lobi dan negosiasi terkait tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing negara. Proses ini akan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan tahapan yang panjang mulai dari penyusunan perjanjian hingga ke proses ratifikasi. Pada akhirnya, hal ini akan memengaruhi implementasi AEOI untuk kedua negara.

Contoh lainnya, negara-negara dengan kerahasiaan bank yang kuat, seperti Swiss, akan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan AEOI. Federal Council

8 Apabila dibandingkan, IGA yang diterapkan Amerika Serikat merupakan perjanjian bilateral sedangkan MCAA yang digagas OECD adalah perjanjian multilateral.

Swiss (2014) pernah mengungkapkan bahwa “*The question regarding the countries with which Switzerland should introduce this exchange of data is not affected by the signing of the multilateral agreement; ...*”⁹ Sebelumnya, Federal Council Swiss juga menyatakan bahwa “*Negotiations on the automatic exchange of information will be initiated with further selected countries. In an initial phase, consideration will be given to countries with which there are close economic and political ties ...*”¹⁰

Berkenaan dengan kedua contoh di atas, Indonesia telah memiliki rencana untuk menandatangani FATCA dan secara bertahap akan melakukan pertukaran informasi dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data *US Department of The Treasury* per 11 April 2018, Indonesia telah berada dalam status *agreement in substance* atas Model 1 IGA dalam FATCA.¹¹ Untuk Swiss, saat ini Indonesia dan Swiss juga telah berada pada status *activated bilateral exchange relationship* per 1 Januari 2018 sehingga terdapat komitmen kedua negara untuk melaksanakan AEOI. Kerja sama bilateral serupa juga telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lainnya.¹²

Kedua, berdasarkan Knobel dan Meinzer (2014) terdapat tantangan terkait keterbatasan informasi dan tuntutan asas resiprokal. Pertukaran informasi melalui AEOI menempatkan negara-negara di dalamnya terlibat secara aktif dalam mengirimkan dan menerima

9 Dikutip dari <https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-55327.html>

10 Dikutip dari <https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-54768.html>

11 Data diperoleh dari <https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx> dan Press Release Kementerian Keuangan No. 25/KLI/2016 tanggal 2 Mei 2016 (dapat diunduh di https://www.kemenkeu.go.id/media/3674/pr_250001.pdf)

12 Daftar yurisdiksi dan status *activated exchange relationship* selengkapnya dapat dilihat di <http://www.oecd.org/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationship>

informasi. Walaupun dalam AEOI ini jenis informasi yang akan dipertukarkan telah disepakati secara global, namun masih terdapat kemungkinan informasi tersebut terbatas atau tidak tersedia sehingga asas resiprokal sulit dipenuhi.¹³ Artinya, terdapat kemungkinan suatu negara aktif menerima informasi namun pasif dalam mengirimkan informasi. Selain itu, dimungkinkan pula negara mitra membutuhkan tambahan informasi melalui prosedur EOIR. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan bagi otoritas pajak untuk terus menyempurnakan *database* perpajakannya. Untuk menjawab hal ini, DJP telah memiliki instrumen hukum yaitu PMK No.16/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Selain itu, koordinasi dan penghimpunan data serta informasi juga terus dilakukan DJP dengan melibatkan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya (ILAP) sesuai PP No. 31 Tahun 2012.¹⁴

Ketiga, keterbukaan informasi pada AEOI hanya menasar pada data wajib pajak Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri. Artinya, keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan ini belum mencakup keterbukaan informasi di dalam negeri. Walaupun di Indonesia aturan keterbukaan informasi perpajakan telah diatur dalam Pasal 35 UU KUP, namun keterbukaan tersebut terbatas untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, data perbankan pun hanya bisa dibuka setelah ada permintaan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesetaraan perlakuan antara wajib pajak yang

menyimpan harta di luar negeri (yang datanya bisa diperoleh melalui AEOI) dengan wajib pajak yang menyimpan harta di dalam negeri, pemerintah dan parlemen mempunyai tanggung jawab bersama untuk segera menuntaskan perubahan UU KUP, termasuk revisi atas UU Perbankan dan UU lainnya yang mengatur kerahasiaan informasi keuangan.

Tantangan keempat yang harus dihadapi adalah belum seluruh informasi yang berkaitan dengan perpajakan tercakup dalam AEOI ini. Informasi seperti kepemilikan properti berupa tanah atau bangunan merupakan informasi yang tidak tercakup dalam AEOI walaupun kedua informasi tersebut cukup penting untuk kepentingan pajak. Sebagai contoh, mengacu pada data DJP terkait *tax amnesty*, terdapat deklarasi harta luar negeri berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 231 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan bagi otoritas pajak untuk mengetahui nilai properti wajib pajak yang belum dilaporkan di luar negeri sehingga dapat dikenakan pajak melalui penerbitan Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak. Salah satu cara yang dapat ditempuh DJP untuk memperoleh informasi ini adalah melalui pertukaran informasi berbasis permintaan (*on request*) kepada negara mitra. Lebih lanjut, dalam hal kemudian diketahui bahwa aset tersebut belum dilaporkan dan belum dikenakan pajak, otoritas pajak Indonesia juga telah memiliki sarana penegakan hukum berikut sanksinya, yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 dan PP No. 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

Implementasi AEOI akan mengakibatkan dasarnya informasi keuangan yang mengalir ke DJP untuk selanjutnya dapat diolah dan dipetakan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, tantangan terakhir yang dihadapi adalah hak pemajakan bagi Indonesia atas informasi dari AEOI. Dalam konteks perpajakan internasional,

hak pemajakan ini harus dicermati merupakan kewenangan Indonesia untuk mengenakan pajak atau bukan. Pertimbangan ini terutama terkait dengan informasi keuangan dari wajib pajak berstatus Bentuk Usaha Tetap, menjalankan usaha di beberapa negara, atau memiliki skema transaksi lintas negara. Oleh karena itu, dalam AEOI ini, harus dipastikan bahwa informasi yang akan berujung pada penetapan utang pajak merupakan informasi yang *reliable*, dapat dipertanggungjawabkan, serta telah melalui proses analisis yang memadai. Hal ini juga membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai di DJP untuk memproses seluruh informasi tersebut selain didukung oleh sistem TI yang handal. DJP dapat mempertimbangkan kebutuhan untuk menambah sumber daya, membentuk atau menugaskan unit khusus dalam menangani informasi AEOI dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data, dan menyiapkan panduan mekanisme pemanfaatan data yang bersumber dari AEOI.

PENUTUP

Data yang diperoleh dari program *tax amnesty* menunjukkan bahwa potensi pajak Indonesia yang sebenarnya bisa di-*collect* jauh lebih besar daripada yang selama ini telah diperoleh. Berkaca pada kondisi ini, keikutsertaan Indonesia dalam AEOI jelas memperlihatkan keseriusan Indonesia untuk memperoleh penerimaan pajak secara maksimal sesuai dengan basis yang seharusnya. Pemerintah dan otoritas pajak pun melakukan langkah-langkah yang signifikan guna memenuhi persyaratan implementasi AEOI, mulai dari penyusunan dasar hukum sampai level UU, aspek administratif, teknologi informasi, dan kerahasiaan data. Atas dasar tersebut, Indonesia dapat dinyatakan telah siap dalam mengimplementasikan AEOI.

Namun demikian, terdapat tantangan-tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan otoritas pajak, baik tantangan yang berasal dari eksternal

misalnya dari negara-negara dengan kerahasiaan informasi perbankan yang kuat maupun tantangan internal, antara lain kecukupan basis data perpajakan dan pemanfaatan informasi dari AEOI. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk konsisten dalam menerapkan aturan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, dan penguatan koordinasi lintas instansi sehingga penerapan AEOI dapat berjalan baik.

Paling lambat 30 September 2018 nanti Indonesia akan memulai mengirimkan dan menerima informasi keuangan dari hampir seluruh negara di dunia dalam kerangka AEOI. Dengan dimilikinya informasi keuangan tersebut, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Langkah penting ini akan menjadi salah satu sarana utama pencapaian target penerimaan dan perbaikan *database* perpajakan secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Kebijakan DJP Pasca Tax Amnesty* (Materi Presentasi DJP pada Seminar IKPI 11 Juli 2017). Diunduh pada laman <http://www.ikpi.or.id/content/materi-semnas-11-juli-2017>

-----, 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017*. Diunduh pada laman <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202017.pdf>

Federal Council Swiss. 2014. *Automatic exchange of information in tax matters: Federal Council adopts negotiation mandates with partner states*. Diakses pada laman <https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-54768.html> tanggal 16 Februari 2018

-----, 2014. *Switzerland takes further step towards introduction of automatic exchange of information*. Diakses pada laman <https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-55327.html> tanggal 16 Februari 2018

Henry, James S. 2012. *The Price of Offshore Revisited*. Tax Justice Network

Kementerian Keuangan. 2018. *APBN Kita: Kinerja dan Fakta Edisi Maret 2018*. Diunduh pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/media/9676/apbn-kita-edisi-maret-2018.pdf>

Knobel, Andres dan Markus Meinzer. 2014. *Automatic Exchange of Information: An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption*. Tax Justice Network

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2016. *OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers*. Diunduh pada laman <http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2016.pdf>

-----, 2017. *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (2nd edition)*. Paris: OECD Publishing

-----, 2018. *Signatories of MCAA*. Diunduh pada laman <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf>

-----, 2018. *Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters - Implementation Handbook (2nd edition)*. Diunduh pada laman <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.pdf>

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta

Spanjers, Joseph dan Dev Kar. 2015. *Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2004-2013*. Global Financial Integrity

Urinov, Vokhid. 2015. *Developing Country*

Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information. Law, Social Justice, & Global Development Journal (LGD)

US Department of The Treasury. 2018. *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*. Diakses pada laman <https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx> tanggal 5 Mei 2018

**) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan Kementerian Keuangan secara keseluruhan.*

DANI RAMDANI
PUSDIKLAT PAJAK

KURIKULUM BAGI GENERASI MILENIAL

ABSTRAK

Kurikulum merupakan bagian penting dari keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan (diklat). Kurikulum yang baik tidak hanya mencapai tujuan dari pembuatannya tetapi juga harus menjadi cerminan penerimaan dari para pemangku kepentingan. Generasi Millennial (GM) yang lahir antara tahun 1982 hingga tahun 2000 memiliki kepentingan terhadap desain kurikulum karena menyangkut masa depan mereka setelah menjalani kurikulum dari suatu diklat. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengungkap dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang bagaimana kurikulum dan aspek pendidikan bagi GM. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurikulum bagi pembelajar GM harus memiliki karakteristik: (1) pemanfaatan sepenuhnya teknologi, informasi, dan komunikasi; (2) terbentuknya relasi antar kurikulum; (3) terdapat ruang bagi pembelajar GM untuk belajar sesuai kebutuhan, minat dan berinovasi; (4) pengajar adalah panutan pembelajar GM sehingga harus kompeten di bidangnya dan mampu melaksanakan diklat berbasis pemecahan masalah dan situasi riil (kasus nyata).

Kata Kunci: Generasi Millennial, Kurikulum, Flexner, SPICES Model

PENDAHULUAN

Keberhasilan pendidikan dan pelatihan (diklat) ditentukan sejumlah faktor, salah satunya adalah desain kurikulum. Kurikulum yang baik akan dirancang dan didesain sesuai dengan tujuan diadakannya diklat. Stabback (2016) dalam "What Makes a Quality Curriculum" mengemukakan bahwa suatu kurikulum yang baik diraih dari suatu capaian proses pengembangan kurikulum yang baik pula. Proses pengembangan kurikulum mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Terencana dan sistematis;
2. Bersifat inklusif dan konsultatif;
3. Dirancang oleh para profesional di bidang kurikulum;
4. Bersifat beralur siklus (*cyclical*); dan
5. Berkelanjutan (*sustainable*).

Salah satu unsur penting dari kelima ciri kualitas kurikulum yang baik adalah sifat inklusif dan konsultatif yang di dalamnya termasuk kemampuan dalam merefleksikan nilai-nilai sosial. Baik pengampu mata ajar maupun pembelajar

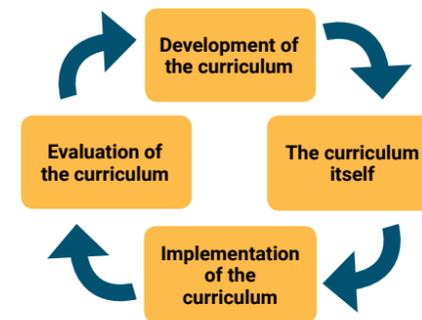
merupakan pemangku kepentingan dari suatu kurikulum. Stabback (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengampu mata ajar berkepentingan terhadap kurikulum karena akan memberi bagian untuk berkontribusi sebagai ahli yang mumpuni dan memahami apa yang diharapkan baik oleh para pemangku kepentingan lainnya terutama pembelajar. Sedangkan bagi pembelajar, kurikulum yang didesain dengan baik menjadi sangat berarti karena suatu kurikulum dapat menjadi jembatan untuk mengubah nasib.

Sehubungan dengan perkembangan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran, saat ini pembelajar lazim dikelompokkan menjadi suatu generasi. Kelompok terakhir yang dikenal adalah Generasi Milenial. *Faculty Development and Instructional Design Center*, Universitas Northern Illinois mendefinisikan Generasi Milenial sebagai kelompok yang dilahirkan mulai tahun 1982 sampai 2000. Relevan dengan keadaan tersebut, tulisan ini akan mengupas permasalahan bagaimana memiliki kurikulum yang berkualitas bagi pembelajar Generasi Milenial.

REVIEW LITERATUR

Pembahasan mengenai desain kurikulum terus berlangsung sebagai suatu proses dinamis yang mendukung terwujudnya hasil pembelajaran yang baik sesuai tujuan dibuatnya kurikulum tersebut. Desain kurikulum berkembang pesat terutama untuk pembelajar pada tingkat pendidikan tinggi. Penelitian terbaru mengenai kurikulum dilakukan oleh Philip Stabback. Stabback (2016) dalam "What Makes a Quality Curriculum" mengemukakan adanya empat proses siklus kategori sebagai kriteria dalam menentukan apakah suatu kurikulum itu berkualitas atau tidak. Keempat proses tersebut adalah: (1) pengembangan kurikulum; (2) kurikulum itu sendiri; (3) implementasi kurikulum; dan (4) evaluasi kurikulum. Keempat proses siklus tersebut tergambar dalam Gambar 1. Pada bagian pengembangan kurikulum, tercakup sifat inklusif dan konsultatif yang merupakan subkriteria yang menentukan kualitas kurikulum.

Kurikulum yang dikemukakan oleh Stabback tersebut merepresentasikan



Gambar 1: Kategori untuk Kriteria Menentukan Kualitas Kurikulum

Sumber: Stabback, What Makes a Quality Curriculum

harapan dan tujuan dari *United Nations Education, Science and Cultural Organization* (UNESCO) yang mengeluarkan program *Sustainable Development Goals* (SDG) dimana pendidikan menjadi salah satu basis dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu kurikulum dipandang pembelajar sebagai jembatan untuk mengubah kehidupan (nasib).

Jauh sebelum UNESCO melakukan dorongan pengembangan kurikulum yang baik, sebenarnya telah dikembangkan kurikulum yang selama ini disebut dengan kurikulum dengan pendekatan tradisional. Kurikulum ini dibuat oleh Abraham Flexner (1910) yang menyelesaikan dan membuat laporan mengenai pengembangan pendidikan di dunia kedokteran. Flexner mengajukan ciri-ciri kurikulum yang saat itu diterapkan di bidang kedokteran di wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Ciri dari kurikulum model Flexner yang dikenal sebagai pendekatan tradisional ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan berporos pada pengajar (*teacher-centered*) dimana pengajarlah yang menentukan dan mengendalikan sepenuhnya bagaimana proses pembelajaran dilakukan;
- b. Penyampaian ilmu bersifat satu arah

dimana ilmu berasal dan disalurkan dari pengetahuan pengajar, lalu pembelajar mencontoh atau mengikuti apa yang disampaikan oleh pengajar;

- c. Tahapan pembelajaran bertumpu pada kedisiplinan, bersifat kaku dimana pembelajar harus mengikuti semua tahapan pembelajaran sesuai urutan materi ajar yang telah ditetapkan;
- d. Pola hubungan pengajar dan pembelajar bersifat *hospital oriented*, dimana pengajar melayani/membantu pembelajar apabila pembelajar memiliki masalah;
- e. Pembuatan program telah terstandar sehingga tercipta keseragaman bagi semua pembelajaran dan program tanpa memperhatikan serta menampung kebutuhan setiap individu pembelajar;
- f. Pola pembelajaran bersifat oportunistis sehingga cenderung hanya melatihkan saja semua materi sampai pembelajar menjadi mahir.

Pada perkembangannya kurikulum terus berubah, dan pada tahun 1984, Harden, Sowden, dan Dunn mengenalkan desain kurikulum yang dikenal dengan *The SPICES Model*. Model ini didesain dan memiliki ciri yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kurikulum tradisional. Kurikulum yang didesain disarankan untuk mengacu pada setiap unsur model SPICES, yaitu sebagai berikut:

- a. *Student-centered*, artinya kurikulum yang didesain harus berorientasi pada kebutuhan pembelajar sehingga mampu meningkatkan motivasi pembelajar sekaligus menjadi tahap persiapan pembelajar untuk memasuki pembelajaran yang berkelanjutan;
- b. *Problem-based*, artinya kurikulum harus menyajikan materi pembelajaran dalam rancangan menyelesaikan permasalahan sehingga pembelajar memiliki media untuk menyatukan dan mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan permasalahan;

- c. *Integrated*, artinya kurikulum harus memiliki relasi dengan kurikulum lain untuk materi ajar yang berhubungan sehingga kurikulum tidak bersifat tunggal atau berdiri sendiri;
- d. *Community-based*, artinya kurikulum harus menyajikan suatu situasi komunitas yang nyata atau riil sehingga bukan seperti laboratorium yang terpisah dari dunia luar;
- e. *Electives*, artinya kurikulum memungkinkan untuk menyajikan mata ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan pembelajar. Mata ajar tidak lagi semuanya bersifat wajib dan harus diambil oleh pembelajar namun tersedia juga mata ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar yang berminat untuk lebih mendalami mata ajar tertentu;
- f. *Systematic*, artinya kurikulum yang didesain memungkinkan pembelajar untuk memiliki inisiatif serta berkreasi dengan melakukan eksperimen serta latihan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengajar.

Salah satu penelitian mengenai penerapan *SPICES Model* dilakukan oleh John A. Dent (2014). Dent menerapkan *SPICES Model* ini dalam rangka mereformasi kurikulum. Hasil reformasi kurikulum menunjukkan bahwa *SPICES Model* tidak hanya mampu meningkatkan kualitas program pembelajaran, tetapi membuka juga kesempatan terjadinya pengajaran yang inovatif.

Setelah pembahasan mengenai kurikulum, maka sisi penting dari penelitian adalah berkenaan dengan pembelajar yang dikategorikan sebagai pembelajar Generasi Milenial (GM). Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, *Faculty Development and Instructional Design Center*, Universitas Northern Illinois mendefinisikan GM adalah mereka-mereka yang dilahirkan mulai tahun 1982 sampai 2000 dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Komputer dianggap bukan teknologi yang terpisah tapi merupakan bagian

- dari GM itu sendiri;
 - b. Dalam memandang realitas, itu hanya temporer dan tidak berlangsung lama karena suatu realitas dapat dengan mudah diubah dengan teknologi digital;
 - c. Perbuatan dianggap lebih berarti daripada hanya sekedar mengetahui karena mengetahui bukanlah tujuan akhir. Hasil dan tindakan lebih berharga daripada hanya pengetahuan berupa akumulasi dan kumpulan fakta-fakta;
 - d. Proses pembelajaran bukan mutlak sebagai proses logika tapi lebih ke arah model Nintendo. Nintendo menjadi simbol bagaimana pembelajaran dilakukan dimana memecahkan masalah lebih mudah dengan pendekatan *trial and error*. Oleh karena itu, suatu kegagalan dianggap sebagai cara cepat mencapai kemahiran karena kegagalan itu adalah pembelajaran;
 - e. Pembelajar GM terbiasa dengan gaya hidup multitugas dan multiperan. Mereka lebih nyaman melakukan beberapa pekerjaan sekaligus secara simultan dibandingkan dengan menangani pekerjaan secara urut satu per satu;
 - f. Sangat menghargai ketepatan waktu sehingga tidak ada toleransi terhadap penangguhan. GM tumbuh di jaman budaya *“just-in-time service oriented”* dimana setiap kegiatan sangat mendasarkan pada konsep ketepatan waktu;
 - g. *Sharing knowledge* menjadi pola yang biasa dimana batasan antara pencipta dan pemakai suatu pengetahuan menjadi kabur. Sikap GM ini terbentuk karena terdapat keyakinan bahwa dalam dunia digital apabila sesuatu telah ditampilkan secara digital maka sesuatu itu adalah milik bersama, tidak lagi ada batasan pemilik, pengguna dan bebas untuk diubah-ubah.
- a. GM menginginkan dan merasa adanya kesatuan secara individu maupun kolektif dengan orang tuanya;
 - b. GM merasa dilindungi dan dibayangi oleh figur-figur baik orang tua maupun tokoh-tokoh panutannya;
 - c. GM penuh motivasi, berorientasi pada tujuan, berani dan penuh percaya diri karena mereka ingin dipandang berbeda dari lainnya;
 - d. GM berorientasi pada tim;
 - e. GM berorientasi pada capaian/prestasi yang tinggi;
 - f. GM berorientasi pada prestasi sehingga seringkali merasa tertekan dalam menjalaninya;
 - g. GM bersikap konvensional dengan lebih menghormati senior dan orang tua tetapi lebih mengikuti arus (mainstream) dalam berpakaian dan musik;
 - h. GM lebih menerima perbedaan gaya hidup, ras, maupun kesukuan.

Peneliti Fred B.Newton (2000) mengemukakan bahwa pembelajaran terhadap pembelajar GM yang ia sebut sebagai *Student Millennial* membutuhkan lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan sebagai berikut:

- a. Fakultas dan staf harus menyadari pembelajar memiliki sikap dan perilaku yang berbeda sebagai hasil dari revolusi sosial dan teknologi;
- b. Kampus harus menawarkan aktivitas baik di dalam kelas sekaligus di luar kelas untuk mendukung peminatan pembelajar dalam mendalami mata ajar tertentu;
- c. Revolusi informasi harus dibantu dengan menurunkan ketegangan pembelajar dalam pencarian informasi/pengetahuan sekaligus kemudahan akses atas informasi/ pengetahuan;
- d. Pembelajar memerlukan keahlian bagaimana mereka mengatur kehidupan sehari-harinya seperti kemampuan mengatur waktu, keuangan, pergaulan, serta menangani tekanan dan stres.

Karakteristik unik GM dipaparkan juga oleh *California State University at Long Beach* yaitu sebagai berikut:

- e. Kampus harus memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk menggugah pemahaman dan penjiwaan atas arti dan tujuan aktivitas kehidupannya;
- f. Pengajar harus mengerti dan mengajarkan kepada pembelajar agar terbiasa dengan budaya dinilai, saling menilai dan saling menjaga (*the peer culture*);
- g. Pengajar harus memahami perilaku pembelajar dimana mereka memandang suatu perilaku itu adalah perilaku normatif di lingkungan sosialnya;
- h. Pengajar dan seluruh staf harus menyadari bahwa pembelajar memandang pengajar dan staf sebagai panutan, *role model* bagi proses pembelajaran mereka.

STUDI KURIKULUM DAN GENERASI MILENIAL

Alismail dan McGuire (2015) mengemukakan pentingnya kurikulum dalam menghadapi era abad ke-21. Alismail dan McGuire mengemukakan bahwa pengetahuan akademis dan keahlian yang terstandar dalam kurikulum tidak berhenti hanya pada penentuan hasil tes sebagai penentu keberhasilan pembelajar. Mereka mengemukakan bahwa merupakan hal yang penting dari suatu kurikulum untuk memungkinkan pembelajar menjadi kreatif dan pandai memanfaatkan teknologi dengan cara yang unik dan tidak terpaku pada suatu standar dalam pembelajaran guna mencapai keahlian. Kurikulum yang baik memungkinkan adanya integrasi multimedia terhadap aktivitas di kelas yang memberi kesempatan kepada pembelajar untuk meningkatkan prestasi akademis. Selain itu, kurikulum mampu meningkatkan keahlian bersosialisasi dengan melakukan komunikasi, berbagi informasi, bertukar ide, dan menyatakan pendapat pada saat mempersiapkan suatu proyek atau melakukan riset yang dilakukan secara *online*.

Peneliti lainnya, Djiwandono (2017)

telah melakukan penelitian berkenaan dengan GM khususnya berkaitan dengan gaya pembelajaran (*the learning styles*). Penelitian dilakukan untuk menguji apakah gaya pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi GM yang merupakan 22 orang siswa bahasa. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan Djiwandono memang terkait dengan GM namun bukan penelitian GM berkenaan dengan aspek kurikulum.

PEMBAHASAN

Dari rewiu literatur mengenai kurikulum dan GM yang dilakukan penulis, belum diperoleh studi yang menyeluruh mengenai kurikulum yang didesain khusus bagi GM. Kurikulum bagi era pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan Alismail dan McGuire tidak spesifik didesain untuk pembelajaran GM, sedangkan Djiwandono membahas mengenai pembelajaran GM namun penekanannya lebih pada gaya pembelajaran dan tidak membahas mengenai kurikulum bagi GM.

Pokok penting dari studi literatur adalah penelitian yang dilakukan Dent yang menyatakan bahwa hasil reformasi kurikulum menunjukkan bahwa SPICES Model tidak hanya mampu meningkatkan

kualitas program pembelajaran namun membuka juga kesempatan terjadinya pengajaran yang inovatif. Sedangkan butir penting dari paparan Universitas Northern Illinois, *California State University at Long Beach*, dan Fred B. Newton adalah adanya beberapa karakteristik umum pembelajar GM, yaitu:

1. Pembelajaran memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai kesatuan gaya hidup (*way of life*) sehingga berorientasi pada tujuan, pemecahan masalah dengan tidak khawatir dengan kegagalan karena dianggap sebagai proses pembelajaran. Dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, pembelajaran GM lebih fleksibel dalam hal lokasi pembelajaran karena mereka menyukai baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas;
2. Pembelajar sangat mendukung capaian prestasi meskipun dalam prosesnya sangat terbiasa dengan pola kerja kelompok. Karena itu pembelajar GM terbiasa dengan multitugas dan multiperan dalam lingkungan kompetitif namun kooperatif. Meskipun demikian pembelajar GM ini karena dalam lingkup penuh tekanan dipandang rawan terhadap stres;

3. Berbeda dengan tampilan yang cenderung terlihat nonformal dan egaliter, pembelajar GM ternyata menjunjung pengajar sebagai panutan atau *role model*.

Guna mengidentifikasi bagaimana model kurikulum pembelajaran bagi GM, maka dilakukan temu karakteristik Model SPICES menurut Harden, Sowden, dan Dunn dengan karakteristik umum pembelajar GM sebagaimana dikemukakan Universitas Northern Illinois, *California State University at Long Beach*, dan Newton. Tujuan dari penetapan titik temu karakteristik ini adalah mencari karakteristik kurikulum yang bersifat mereformasi kurikulum agar selaras dengan karakter pembelajar GM. Hal ini menjadi pijakan yang kuat karena kurikulum SPICES Model telah digunakan Dent dalam rangka mereformasi kurikulum dan hasilnya menunjukkan bahwa SPICES Model tidak hanya mampu meningkatkan kualitas program pembelajaran namun membuka juga kesempatan terjadinya pengajaran yang inovatif. Sedangkan karakteristik pembelajar GM telah dikemukakan oleh Universitas Northern Illinois, *California State University at Long Beach*, dan Fred B. Newton. Temu karakteristik kurikulum pembelajar GM dipaparkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Temu Karakteristik Kurikulum Pembelajaran GM

ITEM	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY	COMPETITIVENESS & TEAMWORK	ROLE MODEL
S	V	1	2
P	V	2	1
I	V	V	V
C	V	2	1
E	V	1	2
S	V	1	2

Pengisian Tabel 1 dilakukan dengan mempertimbangkan temu bobot ketiga karakter menurut Universitas Northern Illinois, *California State University at Long Beach*, dan Newton kepada karakter SPICES menurut Harden, Sowden, dan Dunn. Pemberian angka 1 dan 2 untuk menunjukkan penekanan (lebih fokus) antara karakter pembelajar (*competitiveness & teamwork*) dengan karakter pengampu/pengajar (*role model*) pada setiap karakter SPICES.

Dari Tabel 1 diperoleh titik temu karakteristik-karakteristik pembentuk desain kurikulum pembelajar GM sebagai berikut:

1. Teknologi, informasi, dan komunikasi merupakan karakteristik yang diperlukan pada semua unsur model SPICES;
2. Unsur *integrated* diperlukan bagi ketiga karakter pembelajar, pengajar dan teknologi, informasi, dan komunikasi agar kurikulum yang didesain memiliki relasi (tidak bersifat tunggal atau berdiri sendiri) dengan kurikulum lain untuk materi ajar yang berhubungan;
3. Pembelajar GM yang memiliki karakter kompetitif meskipun dalam lingkungan kerjasama tim memerlukan karakteristik kurikulum yang:
 - a. Berorientasi pada kebutuhannya (*student-centered*);
 - b. Memungkinkan pembelajar mengambil dan mendalami mata ajar yang sesuai dengan minatnya (*electives*); dan
 - c. Memungkinkan pembelajar melakukan inovasi (berkreasi, bereksperimen dan berlatih) atas inisiatifnya, tanpa dipengaruhi pengajar.
4. Pengajar yang menjadi panutan (*role model*) pembelajar GM dituntut untuk memiliki karakteristik:
 - a. Memiliki kompetensi dan melakukan pendidikan, pengajaran dan pelatihan (dikjartih) yang berorientasi pada pemecahan

masalah (*problem-based*);

- b. Memiliki kompetensi (ilmu dan pengalaman) dan melakukan dikjartih yang berorientasi pada situasi yang riil, kasus nyata, dan bukan yang cenderung hanya teoretis, hasil kerja di laboratorium (*community-based*).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kurikulum bagi pembelajar GM memiliki karakteristik bahwa pembelajaran harus didukung sepenuhnya oleh pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam dikjartih dengan memperhatikan bahwa kurikulum tersebut tidak berdiri sendiri tetapi harus memiliki relasi dengan kurikulum lainnya. Relasi kurikulum satu dengan lainnya akan mendukung sepenuhnya pada pembelajar GM untuk mengambil pelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, minatnya, dan memberi mereka ruang untuk berinovasi. Bagi pengajar, kompetensi di bidangnya menjadi syarat mutlak karena pengajar menjadi panutan pembelajar GM, terutama dalam melaksanakan dikjartih yang berorientasi pada pemecahan masalah dan situasi yang riil, kasus nyata.

Kurikulum dan desain kurikulum terus berkembang secara dinamis untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tantangan lingkungan pembelajaran. Karakteristik kurikulum pembelajaran GM dapat dijadikan unsur/karakteristik yang dipertimbangkan dalam Desain Pembelajaran di Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan baik untuk pembelajaran klasikal maupun non-klasikal (Peraturan Kepala BPPK nomor PER-4/PP/2017). Tantangan yang nyata untuk melaksanakan kurikulum pembelajar GM adalah: (1) infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai; (2) kompetensi para pengajar/pengampu; dan (3) terwujudnya relasi kurikulum baik relasi kurikulum di internal unit diklat, maupun relasi kurikulum antar unit diklat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alismail, Halah Ahmed, Dr Patrick. 2015. *21st Century Standards and Curriculum: Current Research and Practice*. Journal of Education and Practice, Vol.6, No. 6, 2015.
- Dent, John A. 2014. *Using the SPICES Model to Develop Innovative Teaching Opportunities in Ambulatory Care Venues*. Korean Journal of Medical Education
- Djiwandono, Patrisius Istiarto. 2017. *The Learning Styles of Millenia Generation in University: a Study in Indonesian Context*. International Journal of Education. Vol. 10 No. 1, August 2017, pp. 12-19.
- Flexner, Abraham, 1910, *Medical Education in the United States and Canada – a Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching*. Bulletin Number Four
- Harden, Ronald M, Susette Sowden, dan W.R. Dunn. 1984. *Educational Strategies in Curriculum Development: the SPICES Model*. Medical Education, 284-297
- Newton, Fred B. 2000. *The New Student – Who is the Milenial Student? Abut Campus/ November-December 2000*. Kansas State University.
- Stabback, Philio, 2016, *What Makes a Quality Curriculum*, International Bureau Education, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan
- California State University at Long Beach, Meeting the Needs of Milenial Students*, http://web.csulb.edu/divisions/students2/intouch/archives/2007-08/vol16_no1/01.htm. Diakses pada 18 Desember 2017/

RETYAN LAKSITA MUTIARY

MOMENTUM KEBANGGAAN INDONESIA

MELALUI ASIAN GAMES 2018

Gegap gempita Perhelatan Akbar Asian Games 2018 sudah semakin dekat. Sebagai tuan rumah, Pemerintah maupun masyarakat Indonesia semakin tidak sabar menanti dan mengabadikan event olah raga terbesar di Asia empat tahunan sekali dan kedua terbesar setelah Olimpiade.

Ada rasa bangga campur bahagia yang menyelimuti Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Segala persiapan untuk menyambut Asian Games pun sudah banyak dilakukan, seperti pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dipercepat, Palembang juga meng-*upgrade* fasilitas seperti membangun monorel dengan panjang 25 kilometer, *skybridge* dengan transit kereta ringan (LRT) terminal yang mengambil penumpang dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II ke Jakabaring. Sepanjang sejarah Asian Games, baru kali ini akan ada dua kota yang dijadikan tuan rumah. Indonesia menjadi negara pertama yang menggelar Asian Games di dua kota dalam satu negara secara bersamaan.

Acara yang berlangsung di DKI Jakarta, Palembang, dan beberapa kota di Jawa Barat ini akan dibuka pada 18 Agustus 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi yang kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Pertama kali Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 yang digelar di Jakarta.

Ada hal-hal menarik yang wajib kita ketahui dari Asian Games 2018. Mari kita ulas satu-satu :

FAKTOR INDONESIA TERPILIH JADI TUAN RUMAH ASIAN GAMES 2018

1. **Mundurinya Vietnam sebagai tuan rumah Asian Games**
Indonesia sebelumnya mencalonkan diri menjadi tuan rumah tahun 2019, tetapi dikalahkan Vietnam saat pemungutan suara, kemudian Vietnam diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2019, namun pada akhirnya mengundurkan diri. Alhasil sebagai *runner-up* favorit, oleh *Olympic Council of Asia* (OCA) Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Games yang akhirnya diselenggarakan tahun 2018 agar tidak bersamaan dengan pemilihan presiden.
2. **Antusias penonton yang sangat tinggi**
Para penonton olah raga di Indonesia terbilang sangat antusias, dari data yang diambil OCA, jumlah penonton Indonesia sangat luar biasa. Data

ini diambil ketika ada pertandingan seperti sepak bola, badminton, voli hingga yang lainnya. Menurut eksekutif OCA, Indonesia sangat layak menjadi tuan rumah dibandingkan kota Dubai UEA.

3. **Memiliki ekonomi stabil**
Indonesia memiliki ekonomi yang sangat stabil, bahkan keuntungan yang didapat menjadi tuan rumah Asian Games ini diperkirakan akan besar devisanya.
4. **Memiliki arena olah raga standar Internasional**
Alasan inilah yang paling kuat Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Games, banyak arena olah raga di Indonesia bertaraf internasional seperti stadion Gelora Bung Karno, Jakabaring, hingga Pakansari. Untuk olah raga penyumbang emas terbanyak yaitu bulutangkis, lapangannya sangat standar Internasional.

KIRAB OBOR (TORCH RELAY)

Perjalanan kirab obor Asian Games 2018 rencananya akan melewati 53 kota dari 16 provinsi di seluruh Indonesia. Api akan diambil dari api abadi Asian Games yang tersimpan di Stadion Nasional Dhyana Chand, New Delhi, India yang mana



ASIAN GAMES 2018 | Jakarta Palembang

merupakan tuan rumah Asian Games pertama (tahun 1951) pada tanggal 15 Juli dan akan tiba di Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah pada 18 Juli. Kemudian kirab obor akan melintasi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua Barat, sebelum melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan menyeberang ke Pulau Sumatera. Perjalanan kirab obor di Sumatera akan diawali dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Lampung. Kirab obor akan kembali ke Pulau Jawa dan melintasi Banten, Jawa Barat, akan tiba di DKI Jakarta pada 15 Agustus.

LOGO DAN MASKOT ASIAN GAMES 2018

Konsep desain logo Asian Games 2018



terinspirasi dari bentuk Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang bersketsakan tampak atas Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan matahari bersinar di bagian tengahnya. Matahari tersebut sebagai lambang sumber energi paling utama dengan delapan jalur yang menyebar ke seluruh Asia sekaligus dunia. Selain itu terselip harapan agar Indonesia bisa menunjukkan kehebatannya lewat penyelenggaraan kegiatan ini dan juga menggambarkan energi yang kuat dalam merefleksikan dan mempromosikan Indonesia ke dunia. Logo ini dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Mengusung tema *Energy of Asia*, maskot Asian Games 2018 tergolong unik dan lucu. Maskot ini terdiri atas tiga satwa ciri khas Indonesia yang mewakili keragaman kekayaan hayati Indonesia, yaitu :

- a. Bhin Bhin, si cantik burung Cenderawasih (*Paradisaea Apoda*) yang merepresentasikan strategi dengan mengenakan rompi dengan motif Asmat dari Papua,
- b. Atung, Rusa imut yang memakai sarung dengan motif tumpal dari Jakarta. Atung digambarkan sebagai rusa Bawean (*Hyelaphus Kuhlii*) yang merepresentasikan kecepatan, dan
- c. Kaka, si badak bercula satu (*Rhinoceros Sondaicus*) yang menggambarkan salah satu hewan langka di Indonesia, Kaka digambarkan sebagai badak yang kuat dengan mengenakan pakaian tradisional dengan motif bunga khas Palembang.



BENTUK OBOR MENGGAMBARKAN KEUNIKAN BUDAYA TUAN RUMAH PENYELENGGARA

Di Asian Games 2018 ini, bentuk obor berciri khas keunikan budaya Indonesia. Desain obor diangkat dari kearifan lokal dua kota penyelenggara yaitu Jakarta dan Palembang, dengan memadukan dua alat tradisional untuk beladiri asal Betawi dan Palembang. Paduan alat bela diri tradisional ini menggambarkan dari bersatunya ragam budaya untuk satu tujuan dan merupakan simbol dari nilai dan tingkat keberadaan seseorang di masyarakat maka selalu dijaga, diasah ketajamannya agar selalu tampil bersinar dan melahirkan semangat yang berkobar.

NEGARA PARTISIPAN ASIAN GAMES 2018

Terdapat 45 negara yang akan meramaikan perhelatan Asian Games 2018, termasuk Indonesia. Dari 45 negara yang berpartisipasi sepanjang sejarah, 43 negara telah memenangkan setidaknya satu medali dalam kompetisi. Sedangkan 37 negara telah memenangkan setidaknya satu medali emas dan sementara yang pernah menjadi juara umum adalah Jepang dan Tiongkok.

KEBERKAHAN ATAS PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES 2018 BAGI INDONESIA

Sebagai tuan rumah, Indonesia patut berbangga diri karena penyelenggaraan Asian games 2018 ini memberikan aura positif bagi Indonesia. Bagaimana tidak, ajang ini akan memberikan berkah yang luar biasa, di antaranya :

- a. **Sukses Asian Games bantu menaikkan branding Indonesia**
Penyelenggaraan Asian Games juga akan banyak membuka lapangan kerja dengan adanya kerja sama di bidang souvenir dengan berbagai pengusaha lokal, baik lokal maupun

internasional.

- b. **Promosikan Satwa Indonesia**

Maskot yang diusung di Asian Games 2018 kali ini adalah Bhin-Bhin, Atung, dan Kaka yang merepresentasikan Bhineka Tunggal Ika, tiga satwa cirikhas Indonesia yang unik dan harus dilindungi.

- c. **Ubah Pola Hidup Masyarakat**

Dengan terselenggaranya ajang Asian Games ini akan membantu pola hidup masyarakat yaitu kebiasaan berjalan kaki setelah aturan dilarangnya kendaraan pribadi dicanangkan.

- d. **Asian Games Awal Mula kebangkitan Olah raga Indonesia**

Sesuai tutur Winarto, Direktur Utama Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Asian Games dapat menjadi *trigger* dari banyaknya perubahan terutama terkait olah raga karena banyak fasilitas olah raga yang dibangun dan kecintaan masyarakat terhadap olah raga juga kembali bergairah sebagai *impact* Asian Games 2018.



CABANG OLAH RAGA BARU

Terdapat 40 cabang olah raga yang akan dipertandingkan. Dari 40 cabang tersebut, ada sepuluh cabang olah raga dan disiplin pertandingan yang baru pertama kali diperlombakan dalam perhelatan olah raga se-Asia yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus sampai 2 September mendatang.



Bridge, adalah permainan kartu remi yang mengandalkan kemampuan bermain dan keberuntungan.



Roller Sports (Inline Speed Skating dan Skateboarding) adalah olah raga yang terdiri dari *skateboarding* dan *roller skate*.



Jetski, merupakan permainan air yang menggunakan *boat* bertenaga motor jet.



Ju-jitsu, adalah beladiri dari Jepang seperti gulat yang berfokus menjatuhkan lawan di titik tengah gravitasinya.



Pencak silat, adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia.



Sambo, adalah seni bela diri modern yang dikembangkan di Uni Soviet. Kata *Sambo* kadang ditulis dengan huruf besar "SAMBO", artinya "bela diri tanpa senjata".



Kurash, adalah jenis olah raga beladiri yang memiliki gerakan dasar saling membanting dengan mengaitkan baju khusus. Olah raga *Kurash* berasal di wilayah Tatarstan Asia Tengah atau yang sekarang dikenal dengan wilayah Uzbekistan.



Paralayang/Paragliding, adalah olah raga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain (parasut) yang lepas landas dengan kaki untuk tujuan rekreasi atau kompetisi.



Panjat tebing merupakan salah satu dari sekian banyak olah raga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatinya.



Basket 3x3, awalnya merupakan olah raga jalanan (nonformal) yang populer di daerah perkotaan. Seiring berjalannya waktu olah raga ini akhirnya menjadi sebuah cabang olah raga resmi yang saat ini berada di bawah naungan Federasi Bola Basket Internasional.

BUNGKUS SASONGKO PURNOMO - WIDYAISWARA PUSDIKLAT PSDM

Pentingnya Menjalin Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Banyak hal positif yang mampu diraih dengan menjalin kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Jika dibina secara kontinu, relasi dengan pemangku kepentingan dapat menumbuhkan kepercayaan, saling menghormati, dan saling pengertian. Tidak dapat dipungkiri, menjalin relasi yang baik dengan pemangku kepentingan telak diperlukan ketika mulai muncul konflik atau krisis dalam organisasi. Namun, bukan berarti dalam kondisi organisasi yang sehat tidak diperlukan relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.

SIAPAKAH PEMANGKU KEPENTINGAN?

Pemangku kepentingan adalah sejumlah orang atau kelompok yang langsung atau tidak langsung terlibat dengan tugas atau kegiatan unit organisasi, termasuk yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam memengaruhi hasil secara positif atau negatif. Pemangku kepentingan yang berhubungan secara luas dalam sektor publik secara umum adalah sebagai berikut:

- Pihak lain yang menjadi fokus kegiatan dan pelayanan;
- Pihak yang terlibat secara langsung

atau bertanggung jawab atas kegiatan suatu unit;

- Para pihak yang merancang, menyampaikan dan mendorong penegakan hukum dan aturan yang berpengaruh terhadap fungsi unit organisasi;
- Otoritas lainnya yang berinteraksi, kerja sama atau kolaborasi dengan unit organisasi antara lain dewan atau badan dari entitas sektor publik lainnya;
- Pihak-pihak yang tertarik dengan proses atau dampak dari kegiatan unit organisasi.

Selain kelompok kepentingan seperti di atas, dikenal juga kelompok pemangku kepentingan khusus yang membutuhkan kemitraan, seperti bagian manajemen dan staf, pelanggan, *supplier*, dan publik secara umum.

BERMITRA = DASAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Orientasi terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder orientation*) menjadi salah satu bentuk kompetensi manajerial di Kementerian Keuangan. Kompetensi tersebut berupa kemampuan dalam mengetahui, mengantisipasi, dan merealisasikan kebutuhan pemangku kepentingan dari pemimpin unit organisasi. Seorang pejabat diharapkan memiliki kesadaran untuk menjalin relasi dengan pemangku kepentingan sesuai prosedur dan lingkup tanggung jawabnya.

Tak sampai di situ, seorang pemimpin harus berupaya melakukan inisiatif,

berkomitmen, adalah komponen utama dalam membangun kemitraan.

Relasi yang transparan dibutuhkan karena dialog inklusif dua arah dengan pemangku kepentingan merupakan suatu keniscayaan dalam keberlangsungan organisasi sektor publik. Penting untuk dipahami, memiliki ikatan yang kuat dengan pemangku kepentingan lebih dari sekadar berkomunikasi. Ikatan kemitraan dengan pemangku kepentingan memerlukan pedoman yang jelas dan obyektif dalam menggunakan sumber daya yang efektif dan suatu kemampuan untuk mengenal apa yang dibutuhkan saat itu

Pada kenyataannya, tidak ada metode tunggal dalam bermitra dengan pemangku kepentingan. Akan tetapi pendekatan yang sering dilakukan adalah mengolaborasi antara proses yang terstruktur dan tidak terstruktur. Penting untuk menyesuaikan proses interaksi

lalu. Komunikasi dapat dilakukan termasuk dari kelompok kepentingan dan ahli-ahli dapat menjadi pemangku kepentingan yang potensial.

- Strategi kemitraan komunitas seperti kolaborasi komunitas.
- Pembangunan strategi untuk pencapaian tujuan memberikan informasi kepada pihak lain atas organisasinya, termasuk kemungkinan untuk bekerja bersama dan program lainnya.
- Menyediakan informasi terkait kegiatan dan aktivitas yang terkait dengan organisasi.
- Penggunaan jalur komunikasi yang efektif untuk meyakinkan bahwa pejabat atau staf publik dapat mengetahui informasi pelaksanaan suatu kegiatan yang menjadi perhatian organisasi.

Secara umum keuntungan menjalin kemitraan dengan pemangku

Relasi yang transparan dibutuhkan karena dialog inklusif dua arah dengan pemangku kepentingan merupakan suatu keniscayaan dalam keberlangsungan organisasi sektor publik.

mendayagunakan, dan mengembangkan jejaring kemitraan dalam jangka panjang. Hubungan kemitraan yang diawali dengan komunikasi antarpejabat dengan pihak yang berkepentingan menjadi awal bagi kelancaran kerja sama di masa mendatang yang dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja organisasi.

MEMBANGUN KEMITRAAN

Membangun kemitraan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan baik yang langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dipengaruhi kegiatan yang dilakukan unit organisasi dan menjadi tahap awal dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan. Hubungan kemitraan yang transparan, saling memberi masukan, serta

dengan mempertimbangkan karakteristik yang unik dari para pemangku kepentingan, termasuk sifat dan tingkat kepentingannya serta menentukan pendekatan yang paling sesuai.

Satu hal yang juga menjadi kunci, siapa yang menjadi pemangku kepentingan dan proses dalam menampung kebutuhannya akan mempertajam strategi komitmen itu sendiri. Proses konstruksi relasi tersebut bergantung pada tingkat kompleksitasnya, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Representasi dari organisasi kepada lingkungan eksternal melalui media atau media sosial. Internet, media sosial, dan metode komunikasi lainnya saat ini memberikan kemungkinan proses konsultasi yang lebih luas daripada kondisi yang ada di masa

kepentingan telah disebutkan pada awal tulisan. Namun secara lebih spesifik, melibatkan pemangku kepentingan bagi manajemen sektor publik mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, membantu manajemen risiko, mempersingkat proses pengembangan program dan kebijakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor publik, dan meningkatkan kapasitas dalam inovasi.

ERWIN DUADJA
Alumni University of Birmingham

Life Begins At The End Of Your Comfort Zone



Ada sebuah kekhawatiran yang membuat saya galau ketika akan mendaftar program Diploma III Khusus Akuntansi pada tahun 2005 karena mata kuliah yang selalu menjadi momok pada saat menjalani Program Diploma I Kepabeanaan dan Cukai pada tahun 2001 adalah Pengantar Akuntansi. Perasaan yang tidak jauh berbeda juga saya alami ketika akan melanjutkan kuliah Strata-1 (S1) dengan jurusan Teknik Informatika yang menyimpang jauh dari latar belakang pendidikan saya sebelumnya. Namun setelah menjalani kedua fase kehidupan di atas, ketakutan yang menghantui saya

di awal tidak terbukti. Bahkan, banyak manfaat dan pengalaman berharga yang saya dapat, yang pada akhirnya membuat saya percaya bahwa *“Life begins at the end of your comfort zone”* adalah benar adanya.

Quote tersebut pula yang menginspirasi saya untuk memilih jurusan *Master of Business Administration (MBA)* di *University of Birmingham* karena saya merasa bahwa sejak saya kecil sampai dengan sepuluh tahun masa kerja, saya masih mempunyai fobia terhadap *“public speaking”* baik itu dalam bentuk presentasi, menyampaikan pendapat di rapat, mengajar maupun



memimpin tim dalam sebuah *project* pengembangan sistem. Jangankan berbicara di depan umum dalam Bahasa Inggris, dalam Bahasa Indonesia pun saya sering kagok, grogi dan gemetar. Oleh karena itu, saya tertantang untuk memperbaiki kelemahan saya ini dengan mengambil jurusan MBA yang berisi lebih banyak praktikum, *projects* dan *teamwork* daripada *classroom courses*. Dan hal itu terbukti pada saat kuliah, saya yang di kantor lebih banyak bicara dengan komputer melalui logika dan bahasa pemrograman dipaksa untuk presentasi dan bekerja dalam tim setiap harinya. Dengan metode pembelajaran yang seperti itu, lama kelamaan akhirnya saya merasa lebih nyaman untuk presentasi, berkomunikasi, dan memimpin dalam sebuah tim yang saya yakini akan menjadi bekal yang sangat berguna ketika kembali ke tempat kerja.

Ada hal yang sangat berkesan ketika menjalani kuliah MBA, yaitu adanya

kegiatan *Business Simulation* dan *Business Project* di pertengahan setiap semester. *Business Simulation* diselenggarakan selama dua hari di sebuah hotel di kota kelahiran Shakespeare yaitu di Stratford-upon-Avon. Disini kami dibagi menjadi beberapa tim, masing-masing tim diberikan profil lengkap sebuah perusahaan yang sedang berkembang dan diberi tugas untuk menjalankan perusahaan tersebut dalam segala aspek termasuk pembiayaan, keuangan, produksi, Sumber Daya Manusia dan *Research and Development*. Simulasi ini direviu setiap tahun (setiap tiga jam) untuk dilihat perkembangannya selama lima tahun (selama dua hari) yang dijalankan dari program khusus simulasi bisnis di komputer. Sedangkan di *Business Project*, setiap tim akan diberi *client* perusahaan startup lokal di kota Birmingham dan ditugaskan penuh untuk menganalisis dan membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk dapat mengembangkan bisnisnya.

Di dua kegiatan bisnis tersebut, saya mendapatkan wawasan dan pengalaman baru mengenai bagaimana pelaku usaha menjalankan bisnis dengan segala kerumitan dan tantangannya, sehingga ketika berada di dalam lingkungan kerja pemerintahan atau sebagai pihak regulator, saya juga dapat memahami perspektif dari pelaku bisnis yang diatur.

Perlu diketahui juga bahwa jurusan MBA biasanya memiliki jumlah modul atau mata kuliah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jurusan lainnya. Sebagai contoh, di *University of Birmingham*, jurusan MBA harus menyelesaikan dua belas modul dalam dua semester sedangkan di jurusan *Msc Accounting* ataupun *Finance* hanya sekitar enam sampai dengan tujuh modul. Oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan karyasiswa yang mengambil jurusan ini langsung membawa keluarganya turut serta pada saat awal keberangkatan, terlebih lagi bagi yang membawa anak



“Bagi saya, motivasi terbesar saya selain ingin membanggakan orang tua dan keluarga adalah ingin menjadi seorang lulusan program Diploma I Kepabeanan dan Cukai STAN pertama yang bisa lulus kuliah program S2 di Eropa”

yang masih kecil. Mengapa? Karena di awal kuliah, anda tidak akan mempunyai waktu lebih untuk mengurus keluarga anda dengan kepadatan kuliah, *papers* dan terutama *groupworks* dimana rekan-rekan tim anda tidak akan permisif dengan alasan anda yang tidak bisa *all-out* karena harus membagi waktu dengan keluarga. Kuliah dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok sampai dengan tengah malam bahkan sampai dengan menginap di *library* adalah hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Namun demikian, jika anda tetap ingin membawa keluarga, anda bisa melakukannya di tiga bulan terakhir masa studi seperti yang saya lakukan karena di periode waktu itu hanya diisi untuk penyusunan karya tulis akhir yang waktu pengerjaannya bisa lebih fleksibel.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam menghadapi segala tantangan dan ujian

selama menjalani masa studi adalah motivasi yang kuat dalam diri. Bagi saya, motivasi terbesar saya selain ingin membanggakan orang tua dan keluarga adalah ingin menjadi seorang lulusan program Diploma I Kepabeanan dan Cukai STAN pertama yang bisa lulus kuliah program S2 di Eropa, karena selama ini program beasiswa luar negeri hanya didominasi oleh lulusan Diploma IV STAN dan penerimaan umum sarjana Kementerian Keuangan. Ditambah lagi, saya juga diberi tantangan dan berjanji kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) saat itu, Bapak Safuadi, untuk kembali dari studi dengan membawa predikat *“Distinction”* yang alhamdulillah pada akhirnya dapat saya penuhi.

Kesimpulan yang bisa saya ambil dari tugas belajar studi MBA di *University of Birmingham* dan sekaligus sebagai pesan

terhadap rekan-rekan karyasiswa/ calon karyasiswa adalah bahwa jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyamanmu meskipun pada saat menjalaninya akan ada banyak halangan, ujian dan rintangan, insyaAllah selama kita masih bisa sabar, konsisten dan fokus, maka di akhir perjalanan semua itu akan terasa sangat manis, bermanfaat dan indah untuk dikenang.

YOHANA TOLLA

Yuk Lari!

Hidup sehat sudah menjadi gaya hidup masyarakat urban masa kini. Dimulai dari makanan, minuman kesehatan, sampai olahraga. Olahraga pun banyak macamnya, dari yang membutuhkan peralatan spesifik sampai yang sederhana seperti lari. Menjamurnya pusat-pusat kesehatan dan kebugaran tidak membuat olahraga yang satu ini kehilangan peminat, mulai dari sekedar lari santai di pagi hari, sampai ke tingkat yang lebih serius, lari maraton.

Maraton adalah lari jarak jauh sepanjang 42.195 km yang dapat ditempuh sebagai lomba di jalan raya maupun di luar jalan raya. Bagi pelari profesional, jarak 42.195 km tersebut biasanya dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih dua jam, sedangkan bagi pelari pemula memerlukan waktu empat sampai tujuh jam. Istilah “maraton” diambil dari legenda seorang prajurit Yunani yang dikirim dari kota Marathon ke Athena untuk menyampaikan kekalahan bangsa Persia. Mulanya, lari maraton ini hanya untuk laki-laki, namun semenjak Olimpiade Los Angeles tahun 1984, maraton mulai dipertandingkan untuk pelari wanita.

Meskipun memiliki manfaat yang baik bagi tubuh, apabila tidak dilakukan dengan benar, maka maraton dapat membahayakan. Lari maraton bukan merupakan jenis olahraga yang mudah. Selama berlari, kaki kita akan menahan beban 1,5 sampai 3 kali lebih berat daripada bobot tubuh normal sehingga energi yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Sebagai contoh, agar dapat lari terus menerus selama lima menit dalam maraton, kita membutuhkan suplai energi hingga lima belas kali lipat dari kondisi normal. Energi ini harus tersedia selama lebih dari 2 jam bagi pelari profesional, dan hampir 4 jam bagi pelari pemula. Oleh karena itu, pelari

membutuhkan persiapan yang cukup memadai serta stamina yang prima untuk menyelesaikan maraton dengan baik.

Perlu diingat bahwa maraton merupakan olahraga yang cukup menguras tenaga, sehingga persiapan sebelum melakukan maraton tidak cukup dilakukan hanya dalam beberapa minggu saja. Bagi pemula, kira-kira memerlukan waktu beberapa bulan untuk melatih tubuh dan mental. Simak persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh pelari pemula sebelum mengikuti maraton.

TENTUKAN TUJUAN

Sejak awal, tentukan secara spesifik apa tujuan kita mengikuti maraton, misalnya akan mengikuti lomba 5k tiga bulan lagi, atau menurunkan berat badan. Dengan memiliki tujuan maka kita akan lebih termotivasi. Selain itu, carilah “teman seperjuangan” yang akan membantu menguatkan kita untuk mencapai tujuan tersebut.

PERSIAPKAN STAMINA

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maraton memerlukan energi dan stamina yang prima. Selain itu, ditemukan bahwa lima puluh persen pelari maraton akan mengalami cedera, baik cedera ringan maupun cedera berat. Beberapa sumber menyarankan untuk melakukan *check up* ke dokter sebelum melakukan maraton. Dengan mengetahui kondisi tubuh maka kita akan lebih mudah merencanakan program latihan.

Menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup juga harus diperhatikan. Usahakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman ringan yang dapat meningkatkan kadar gula 30 menit sebelum lari. Selain itu, persiapkan air mineral untuk dikonsumsi sebagai tambahan energi selama lari.

LATIHAN SECARA RUTIN

Pelari maraton memerlukan persiapan yang panjang untuk menyelesaikan lari jarak jauh. Oleh karena itu, rencanakan latihan mingguan dengan baik, disesuaikan dengan jarak, tujuan, serta tingkat kebugaran tubuh kita. Bila perlu, kita dapat mencatat durasi dan jarak yang ditempuh setiap kali berlari untuk merancang serta memantau perkembangan. Bagi pelari pemula direkomendasikan untuk berlari jarak jauh hingga 20 kilometer selama dua belas minggu sebelum hari maraton, dimana setiap minggunya disarankan untuk berlari sebanyak 2-3 kali. Kombinasikan latihan antara jalan santai, *jogging*, lari cepat, dan lari jarak jauh. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan setidaknya 5 menit sebelum lari serta perenggangan pada otot kaki setelah berlari untuk mengurangi risiko cedera.

GUNAKAN PERALATAN LARI YANG NYAMAN

Peralatan lari yang nyaman dibutuhkan untuk mengurangi risiko cedera. Kenakanlah sepatu olahraga yang memiliki bantalan empuk serta pastikan kelenturannya. Sesuaikan pula sepatu dengan medan lari. Selain itu, gunakanlah pakaian dari bahan material sintetis seperti *polypropylene*, yang akan menjaga tubuh tetap kering dan memberikan ruang bagi kulit untuk bernapas.

Setelah semua persiapan dilakukan, mulailah berlari. Ingat, kita bukan atlet yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti olimpiade. Jangan terlalu memaksakan diri, kenali batasan tubuh kita, baik secara fisik maupun mental.

BAMBANG KISMANTO
WIDYAISWARA PUSDIKLAT PSDM

Bukan Sekedar Lapar, Kejujuran Itu yang Utama



FOTO : LUIZCLAS DARI PEXELS.COM

Seorang pemuda mendatangi Nabi Muhammad saw. untuk dibimbing masuk agama Islam, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim. “Ya Rasulullah, izinkanlah aku masuk Islam,” ungkap pemuda itu. Rasulullah SAW. pun segera menuntun pemuda tersebut membaca syahadat. Sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat, pemuda itu lalu berkata, “Ya Rasulullah, sebenarnya aku ini selalu saja berbuat dosa dan sulit untuk meninggalkannya, kini aku telah masuk Islam, maka izinkanlah aku berbuat maksiat yang aku sukai.” Mendengar perkataan itu, beliau hanya tersenyum. Menurut riwayat, sebelum pemuda itu memeluk islam, dia sangat terkenal sebagai orang yang jahat. Kegemarannya adalah mencuri, berjudi dan minum khamar. “Tidak apa-apa, tapi, apakah kamu mau berjanji kepadaku?” tanya Rasulullah saw. “Janji apa itu, ya Rasulullah?” jawab pemuda itu. “Maukah kau berjanji mulai saat ini sanggup jujur dan meninggalkan bohong?” pinta

Rasulullah.”Hanya itu, ya Rasulullah? Kalau itu, aku sanggup,” jawab pemuda itu yakin.

Pemuda tersebut kemudian izin pulang dengan senang karena tidak diperintah untuk meninggalkan maksiat, tetapi hanya diperintahkan meninggalkan kebohongan saja. Di jalan, ia bertemu dengan wanita tunasusila yang cantik sehingga membuat syahwatnya naik. Diajaknya wanita tersebut untuk berzina di sebuah rumah. Namun, ketika hampir terjadi perbuatan zina, tiba-tiba pemuda itu ingat janjinya kepada Rasulullah saw. “Apakah jawabanku nanti bila ditanya Rasulullah, sanggupkah aku berbohong kepadanya?” gumamnya dalam hati. “Jika nanti bertemu beliau dan ditanya, apa kau berzina? Bagaimana aku menjawabnya?” gumamnya lagi.

“Kalau aku bilang ‘ya’ sudah tentu terkena hukuman, jika aku bilang ‘tidak’, artinya aku bohong dan melanggar janjiku kepada Rasulullah saw.,” hati kecilnya berseteru.

Terjadi perang batin di dalam dirinya antara ingin terus melakukan maksiat atau menepati janjinya pada Rasulullah saw. Akhirnya, ia memutuskan tidak berzina. Begitulah, setiap kali pemuda itu ingin berbuat maksiat, ia selalu teringat akan janjinya kepada Rasulullah saw. Sampai suatu ketika ia sudah tidak bisa berlutik, ia kembali menghadap Rasulullah saw. dengan penuh kekaguman. “Anda benar, Ya Rasulullah! Anda hanya memintaku tidak berbohong, namun itu membuatku tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya kepada Rasulullah saw.

Pemuda itu pun kemudian berjanji tidak akan bermaksiat lagi dan Rasulullah saw. pun tertawa mendengar pengakuan pemuda itu. Sejak hari itu, dimulailah babak baru dalam hidupnya. Dia telah berhijrah keluar dari kebiasaan berbuat kejahatan menuju kemuliaan hidup hingga akhirnya dia telah berubah

kejujuran dan meninggalkan kebohongan dalam dirinya. Agar dapat menjadi manusia paripurna yang takut kepada Allah, Tuhan Yang Maha Melihat dan Mengetahui, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah maknanya, mengapa Allah SWT melalui firmanNya menghubungkan antara perintah berpuasa, menahan lapar dan dahaga sepanjang hari dengan ketakwaan sebagai hasilnya. Dengan berpuasa, tertanam di dalam jiwa sebuah sifat yang mendasari semua kebaikan, yakni kejujuran.

Sebaliknya, kebohongan merupakan induk dari segala kejahatan. Di kitab suci Alquran juga dijelaskan bahwa kebohongan, sebagai salah satu akar kemunafikan, merupakan sumber kerusakan di dunia. Mengapa begitu? Sebab kebohongan akan selalu diikuti dengan kebohongan yang baru dan biasanya kadarnya lebih besar. Oleh

“Berpuasa itu ibadah yang tidak terlihat oleh mata.”

menjadi mukmin yang saleh dan mulia.

Puasa Ramadhan melatih umat manusia untuk berlaku jujur dan meninggalkan kebohongan. Berpuasa itu ibadah yang tidak terlihat oleh mata. Bagi orang yang berpuasa, bisa saja berpura-pura puasa. malam hari ikut makan sahur, waktu magrib datang ikut berbuka, tetapi di luar waktu itu, ia makan dan minum hingga kenyang lalu bertingkah tak bertenaga seolah sedang berpuasa. Tidak ada orang yang akan mengetahuinya. Namun, hal tersebut tidak akan dilakukan oleh orang yang beriman. Inilah pelajaran mendasar yang sedang ditanamkan kepada sanubari manusia beriman. Kejujuran.

Kejujuran adalah pangkal dari segala kebaikan. Lawannya adalah kebohongan. Membangun kejujuran sama dengan meninggalkan kebohongan, sebagaimana pesan Rasulullah saw. kepada pemuda tadi. Puasa ini adalah pesan dari Tuhan agar orang yang beriman menegakkan

karenanya, ancaman bagi orang yang suka berbohong adalah menghuni dasar dari neraka Jahanam.

Selama sebulan penuh berpuasa, artinya kita telah membiasakan di dalam diri untuk berlaku jujur. Selama 29 atau 30 hari melakukan hal yang sama secara terus-menerus, pelan-pelan akan melahirkan sebuah kebiasaan. Berpuasa selama sebulan berarti membiasakan diri berlaku jujur dan meninggalkan kebohongan. Hasilnya, berlaku jujur dan tidak suka berbohong akan menjadi *habit*. Inilah modal utama orang menjadi baik. Orang-orang besar terdahulu sangat mengutamakan kejujuran ini. Mereka tidak mau berbohong meskipun pada hal-hal kecil. Mereka tetap jujur meskipun tidak dilihat oleh orang lain.

IMAM ASMA NUR ALAM MARBUN

ALOE VERA, SI TANAMAN SERIBU MANFAAT

Kalau di dunia kuliner ada es kepal Milo yang popularitasnya menanjak belakangan ini, di dunia kecantikan ada gel aloe vera yang sedang menjadi primadona.

Demam K-pop dan K-drama di Indonesia yang masih jauh dari surut, turut membawa tradisi *skincare* rakyat Negeri Ginseng ke negeri ini. Tren ini semakin diperkuat oleh para *beauty influencer* di media sosial yang turut menaikkan pamor gel ini. Perempuan, laki-laki, tua, dan muda rela berbondong-bondong mengantri di pusat-pusat perbelanjaan untuk mendapatkan produk-produk berbahan dasar *aloe vera* yang langsung diimpor dari Korea Selatan. Bentuknya beragam mulai dari gel oles yang paling populer, *face spray*, *hand & body lotion*, hingga peralatan mandi. Teksturnya yang lembut, sejuk, dan kandungannya yang cocok bagi semua jenis kulit, memantapkan banyak orang untuk memasukkannya ke dalam ritual perawatan kulit dan rambut sebelum tidur di malam hari.

Selain dipergunakan sebagai produk perawatan tubuh, *aloe vera* juga telah lama populer menjadi oleh-oleh jika Anda berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Anda bisa membeli mentah tumbuhan perdu berdaun tebal ini di berbagai pusat oleh-oleh untuk diolah lebih lanjut. Kalau Anda tidak mau repot mengolahnya, tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam Anda bisa mendapatkan juga berbagai olahan makanan yang

dibuat atau menginkorporasikan *aloe vera* di dalamnya, mulai dari minuman, teh seduh, kerupuk, permen, dodol, hingga cokelat. Di Pontianak, berbagai olahan lidah buaya ini memang sudah cukup masih dikembangkan oleh banyak kelompok usaha. Dengan bibit unggul dan tanah yang cocok, kondisi Pontianak sangat mendukung sekali mengembangbiakkan lidah buaya kualitas super.

Meski begitu, *aloe vera* memang lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan perawatan tubuh. Berikut ini adalah beberapa khasiat utama dari tumbuhan yang sudah dikenal dan dimanfaatkan sejak ribuan tahun yang lalu:

ALOE VERA UNTUK KECANTIKAN

Aloe vera kaya akan vitamin C, E, dan beta karoten yang memiliki khasiat anti penuaan. *Aloe vera* bisa melembabkan kulit tanpa membuatnya lengket. Para pakar

kecantikan juga menyarankan untuk meminum segelas jus *aloe vera* setiap pagi dalam keadaan perut kosong untuk melancarkan pencernaan dan menyembuhkan berbagai masalah di perut. Dengan pencernaan yang sehat, secara tidak langsung akan menjadikan penampilan Anda menjadi lebih *glowing*.

Mencampurkan *aloe vera* dengan berbagai bahan lain juga bisa memberikan berbagai khasiat untuk kecantikan. Untuk kulit kering, Anda dapat mencampurkan *aloe vera* dengan sedikit kunyit, madu, susu, dan air mawar. Apabila ingin wajah Anda bebas jerawat, *aloe vera* dapat dicampurkan dengan kemiri dan lemon. *Aloe vera* sendiri juga memang sudah dikenal lama sebagai zat anti inflamasi. Makanya, tidak heran apabila *aloe vera* menjadi bahan utama produk-produk tabir surya. Bahkan, *aloe vera* bisa dijadikan sebagai pertolongan pertama untuk luka bakar yang ringan. Jus *aloe vera* juga dinilai para ilmuwan sama efektifnya dengan obat yang beredar di pasaran dalam menghilangkan plak di gigi.

ALOE VERA UNTUK KESEHATAN RAMBUT

Kandungan enzim proteolitik dalam *aloe vera* mampu memperbaiki sel-sel kulit mati di kulit kepala. *Aloe vera* juga bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan rambut, mencegah gatal-gatal, dan mengurangi ketombe. Di



FOTO : PNGTREE.COM

dalam rambut terdapat keratin, protein utama rambut yang terdiri dari asam amino, oksigen, karbon dan sedikit hidrogen, nitrogen, serta sulfur. *Aloe vera* memiliki susunan zat kimia yang hampir menyamai keratin tersebut. Untuk mendapatkan khasiat-khasiat di atas, Anda dapat mencampurkan jus *aloe vera* dengan minyak kelapa. Usap dan pijatkan di rambut Anda kemudian diamkan selama mungkin. Lakukan ritual ini setiap seminggu sekali. Kalau Anda sudah memiliki gel *aloe vera* yang dijual bebas, Anda bisa langsung mengaplikasikannya ke rambut Anda setiap malam sebelum tidur.

ALOE VERA UNTUK MENURUNKAN BERAT BADAN

Aloe vera juga bisa memaksimalkan efektivitas diet Anda. *Aloe vera* kaya akan kandungan vitamin dan mineral yang berkontribusi terhadap penurunan berat badan. Dengan kandungan asam amino, enzim, dan sterol, *aloe vera* juga tidak hanya mendukung penurunan berat badan, tetapi juga meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap zat-zat gizi makanan yang Anda konsumsi.

Aloe vera juga kaya akan zat antioksidan yang membantu menurunkan kadar radikal bebas di dalam tubuh Anda, yang

artinya kekebalan tubuh Anda juga ikut meningkat. *Aloe vera* juga merupakan sumber energi dan sumber protein yang mampu membantu Anda yang sedang membentuk otot. *Aloe vera* juga dapat membantu menurunkan kadar glukosa dalam tubuh, sehingga dalam dosis yang wajar sangat cocok bagi para penderita diabetes. Bagi yang sering mengalami kesulitan buang air besar, kandungan glikosidesaloin dalam *aloe vera* mampu membantu mengoptimalkan kinerja usus Anda. Khasiat-khasiat tadi dapat Anda peroleh dengan catatan bahwa Anda mengonsumsinya secara rutin dan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Rasa alami *aloe vera* cukup pahit jadi Anda akan kesulitan mengonsumsinya begitu saja. Anda dapat mengupas *aloe vera*, ambil bagian gel-nya, potong dadu kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam *blender*. Tambahkan jus buah atau sayur yang rasanya cukup manis untuk mengurangi rasa pahit *aloe vera*. Anda juga dapat mencampurkan madu dan lemon ke dalamnya.

(Diolah dari berbagai sumber)



FOTO : PNGTREE.COM

HENI KARTIKAWATI

Duo Kepala



Ini adalah cerita tentang duo kepala yang hanya ada di Magelang. Ya Magelang. Kota kecil di Jawa Tengah, tempat Balai Diklat Kepemimpinan (BDPim) mengemban amanah sebagai tempat untuk menemba para pemimpin Kementerian Keuangan. Magelang sering dikenal karena ketenangan dan keindahan alam yang mengelilinginya. Keindahan alam Magelang yang dikelilingi beberapa gunung tinggi di Pulau Jawa menjadikan Magelang sangat eksotis. Pada kondisi cuaca cerah, deretan gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro seolah hanya berjarak selemparan batu dari jalanan yang kita lalui. Dikelilingi gunung-gunung juga membuat hawa di Magelang cukup sejuk dengan air yang juga masih lumayan dingin yang membuat suasana di Magelang sangat nyaman.

Namun, ini bukan cerita tentang wisata alam Magelang. Ini cerita tentang duo kepala yang bukan Kepala Badan, Kepala Pusdiklat, atau pun Kepala Balai. Bukan juga cerita tentang para Kepala Kantor yang menjadi peserta diklat di BDPim. Ini adalah cerita tentang kepala kambing dan kepala ikan, duo kepala, yang menjadi kuliner andalan Magelang dan BDPim. Dua kuliner yang sangat layak coba jika Anda berkunjung ke Magelang, yang satu kepala kambing dan satu lagi kepala ikan manyung. Duo kepala yang diolah dengan cita rasa berbeda dan keduanya menjadi hidangan yang sangat sensasional untuk dinikmati. Penasaran kan.. Yuk, simak !!



BRONGKOS KEPALA KAMBING

Selama ini brongkos identik dengan potongan daging sapi, telur bulat, tahu, dan kacang tholo. Tapi kuliner yang bisa kita dapatkan di desa Tembarak Temanggung di kaki gunung Sumbing ini adalah brongkos kepala kambing. Desa Tembarak dapat ditempuh setelah berkendara selama kurang lebih 45 menit dari Balai Diklat Pim. Meskipun cukup lama perjalanan ke sana tidak akan membosankan karena panorama alam pegunungan yang bisa dinikmati di sepanjang perjalanan menuju ke sana. Terdapat beberapa warung makan yang menyajikan hidangan yang sama, namun kami merekomendasikan warung brongkos kepala kambing Mbak Nok. Warung mungil Mbak Nok bercat hijau di bagian luar dan terletak di pasar bersebelahan dengan warung makan lain. Warung mungil ini tidak hanya menyajikan brongkos kepala kambing, namun pelanggan warung Mbak Nok sebagian besar adalah penggemar brongkos kepala kambing.

Bagi yang tidak terbiasa dengan kuliner kepala kambing, makanan ini terlihat menyeramkan terlebih sebelum dihidangkan masih berbentuk kepala kambing utuh. Tapi yakinlah, keberanian mencobanya sebanding dengan sensasi pengalaman rasa yang akan didapatkan. Mintalah kepada pemilik warung untuk memotong kepala kambing dalam potongan kecil sebagai tips yang pertama. Tips selanjutnya adalah pejamkan mata saat akan menyuapnya. Kuah kental coklat dengan cita rasa pedas manis berpadu dengan tekstur kepala yang kenyal sangat lezat dimakan dengan nasi putih hangat. Oh ya, bagi yang menyukai pedas, jangan lupa lengkapi makan brongkos kepala kambing dengan sambel *cabe ijo* yang memang menjadi teman brongkos ini. Hayati sensasi memakannya dan dijamin Anda akan ketagihan.

MANGUT KEPALA IKAN MANYUNG

Kuliner yang satu ini akan dapat ditemui di daerah Blabak Magelang, tepatnya di jalan Magelang-Muntilan KM. 10. Jika Anda berkendara dari Magelang, warung ini terletak di sebelah kiri jalan. Sangat mudah dicari karena terletak di pinggir jalan utama dengan tulisan yang cukup besar “Kepala Manyung Mbak Ida”. Warung makan ini juga tidak terlalu besar dan setiap harinya selalu ramai terutama di jam makan siang.

Kalau datang ke warung ini, begitu masuk boleh langsung menuju bagian dapur warung untuk memilih ukuran kepala ikan yang kita mau. Setelah memilih kita akan ditanya mau pedas yang seperti apa: tidak pedas, sedang, atau pedas. Warung ini juga berkonsep swalayan. Pengunjung bebas mengambil sendiri nasi dan tambahan lauk lain yang diinginkan

baru kemudian duduk di tempat yang diinginkan.

Setengah kepala ikan akan tersaji dalam satu piring besar karena memang kepala ikannya sangat besar, sehingga meski hanya menikmati setengah kepala namun daging yang ada masih banyak, cukup untuk lauk dua orang. Tidak perlu dipandang terlalu lama saat kepala ikan sudah sampai meja Anda. Bentuknya memang seram, panjang dan besar. Abaikan itu. Percayalah, sensasi rasa ikan yang sudah diasapi sebelum dimasak berpadu dengan rasa pedas dari rempah-rempah, cabe, dan merica dalam kuah santan kental akan sanggup menghabiskan banyak nasi dalam piring Anda. Kalau masih kurang pedas, Anda dapat menggigit cabe rawit yang berenang-renang di kuah ikannya.



KAMI SIAP ANTAR ANDA

Jadi, kalau Anda berkesempatan berkunjung ke Magelang jangan lewatkan ke dua kuliner ini. Khusus bagi Anda calon peserta diklat di Balai Diklatpim, kalau Anda diajukan sebuah pertanyaan, “Mana yang akan dipilih antara wisata alam, wisata kuliner, atau tugas diklat?”, tidak perlu risau dan galau untuk memilih karena Anda bisa dengan yakin menjawab untuk memilih semuanya. Yang penting Anda bisa mengatur waktunya, bus BDPim siap mengantar Anda. Jangan lupa isi form peminjaman bus dan tetap mematuhi aturan/tata tertib sebagai peserta. Dapatkan sensasi rasa duo kepala kambing dan kepala ikan manyung sebagai salah satu oleh-oleh diklat. Oh ya, keramahan Bu Ida dan Mbak Nok, layak jadi bonus juga buat Anda. Selamat mencoba !!!



ARDES M. Y. SITANGGANG

Genduk

PENGARANG : SUNDARI MARDJUKI
 PENERBIT : GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA
 JUMLAH HALAMAN : 232
 TAHUN TERBIT : 2016

Genduk adalah sebuah fiksi yang diceritakan dengan gaya memoir. Berkisah tentang seorang bocah perempuan berumur sebelas tahun, yang tinggal di desa paling puncak Gunung Sindoro, Temanggung.

Latar belakang dibuat pada tahun 1970-an ketika petani tembakau sudah mulai mengolah tembakau yang masuk kualitas atas di dunia ini untuk dipasok ke pabrik-pabrik rokok.

Genduk melakukan pencarian jati diri dan pencarian atas sosok ayah yang tidak pernah dilihatnya seumur hidup. Konflik terjadi ketika Genduk menemukan kenyataan mengenai ayah yang selama ini dirindukannya. Konflik pun bergulir terkait dengan permasalahan yang dialami oleh para petani.

Genduk merupakan buku yang masuk dalam 10 besar terbaik Kusala Sastra Khatulistiwa 2016. Genduk yang tidak mengenal ayahnya berusaha mencari tahu ayahnya dengan segala cara dan bahkan nekat sampai kabur ke kota untuk menemui ayahnya. Perjalanan Genduk memberikan makna yang mendefinisikan Genduk dan memberikan informasi tentang ayahnya. Sekaligus memberikan dampak yang sangat luas dan berarti bagi Genduk dan desanya. Konflik yang menonjol adalah naik turunnya kehidupan petani tembakau sebelum dan sesudah panen. Sebelum panen hidup dengan kesusahan, jika berhasil maka petani tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi bayang-bayang rentenir menghantui, sehingga bila gagal akan sangat menyengsarakan, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kaburnya Genduk ke kota sekaligus membuka wawasan dan usaha

petani untuk menjual langsung ke penyalur tembakau tanpa melalui perantara lagi, dengan dibantu juragan tembakau yang berhutang budi kepada Genduk, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Konflik muncul lagi disebabkan penjualan yang langsung ke penampung tembakau, perantara tidak mendapatkan untung lagi, sehingga tidak senang dan melakukan perbuatan kriminal.

Kisah Genduk menggambarkan kerasnya kehidupan tidak hanya di kota tetapi juga didesa, orang yang menghalalkan secara cara untuk mengambil keuntungan, seperti kisah rentenir dan perantara penjual tembakau, sekaligus juga kebaikan seseorang untuk menolong orang lain, seperti Kiai yang menolong Genduk dan Bah Djan yang mau membeli tembakau langsung ke petani. Juga kisah kepolosan petani yang hasil tembakau memuaskan, sehingga membeli kulkas, akan tetapi belum ada aliran listrik, sehingga beralih fungsi menjadi lemari. Genduk merupakan kisah yang menarik untuk dibaca.

Yogyakarta



LOS TEMBAKAU

Los Mbako / Los Tembakau, adalah tempat mengeringkan tembakau sehabis dipanen. Tempat yang *instagrammable* ini terletak di Klaten, sekitar 10 km dari BDK Yogyakarta. (Foto: Harjuna Esa Dinasthi)

PANTAI PARANGKUSUMO

Seorang anak kecil yang riang gembira melihat Festival Layang-layang di Pantai Parangkusumo. (Foto: Harjuna Esa Dinasthi)



JL LAKSDA ADISUCIPTO

Senja di Jogja hari itu sungguh istimewa. (Foto: Harjuna Esa Dinasthi)

STASIUN YOGYAKARTA

Stasiun Yogyakarta (Tugu) saat pagi hari. (Foto: Harjuna Esa Dinasthi)



GEROBAK SAPI

Dahulu, gerobak sapi merupakan moda transportasi atau kendaraan pengangkut hasil bumi yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Pemilik gerobak sapi pada masa itu dipandang sebagai golongan dengan status ekonomi yang tinggi. (Foto: Maryadi)



KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



CALL FOR PAPERS 2018

JURNAL BPPK

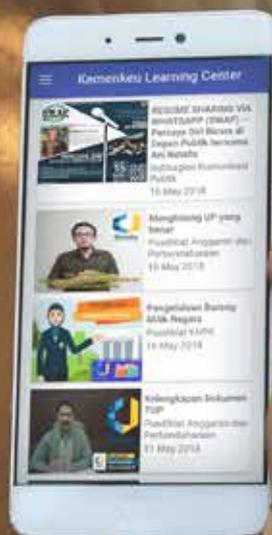
ISSN 2085-3785



Submit karya ilmiah Anda tentang ekonomi / keuangan negara ke:
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk>

FREE OF CHARGE

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja



KLC klc.kemenkeu.go.id
KEMENKEU LEARNING CENTER

